

Hak dan Sumberdaya

2010–2011



PENOLAKAN

Kekuatan Lokal,
Penataan Ulang Dunia



THE RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE

The Rights and Resources Initiative (RRI) atau Prakarsa Hak dan Sumberdaya, merupakan koalisi strategis dari lembaga internasional, regional, dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan, penelitian, dan pelestarian untuk memajukan reformasi penguasaan hutan, kebijakan, dan pasar di seluruh dunia.

Tujuan RRI ialah untuk mendukung perjuangan masyarakat setempat dan Masyarakat Adat melawan kemiskinan dan peminggiran dengan meningkatkan komitmen dan tindakan dunia yang lebih besar untuk reformasi kebijakan, pasar, dan hukum yang menjamin hak mereka untuk memiliki, mengendalikan, dan memanfaatkan sumberdaya alam, terutama lahan dan lahan hutan. Koordinator RRI adalah Rights and Resources Group (Kelompok Hak dan Sumberdaya), sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Washington D.C. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi www.rightsandresources.org.

MITRA



PENDUKUNG



Semua yang disajikan dalam tulisan ini merupakan pendapat dari para penulis dan bukan merupakan pandangan dari lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan ini, atau pandangan dari seluruh Mitra Koalisi.

SEKILAS TENTANG HAK DAN SUMBERDAYA 2010–2011

Apabila 2009 merupakan akhir dari era pedalaman dan awal dari zaman kehutanan mendunia yang baru, maka 2010 merupakan tahun penolakan. Di seluruh dunia, berita dipenuhi laporan mengenai masyarakat hutan dan Masyarakat Adat yang menolak penyerobotan lahan dan pembuatan kebijakan pada tingkat nasional dan dunia, dan pemerintah yang menanggapi dan berupaya untuk memasukkan hak masyarakat. Beberapa pemerintah dan investor swasta menerima atau bahkan merangkul pemain baru tersebut dalam perundingan dan mulai mempromosikan cara-cara usaha dan pelestarian yang lebih adil. Juga ada pernyataan baru yang muluk mengenai pentingnya pembaruan tenurial lahan dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Sayangnya, tidak satu pun memberikan andil dalam mencapai kemajuan secara nyata di seluruh dunia dalam mengakui hak atas lahan dan sumberdaya setempat.

Apabila menengok ke depan ke tahun 2011, kita melihat risiko yang lebih besar, yaitu bencana yang disebabkan oleh iklim, kerawanan pangan, pergolakan politik, dan penataan ulang dunia. Sekalipun demikian, pada waktu yang sama, pergeseran pasar, teknologi, dan kebijakan memberi peluang sangat besar, dan tahun 2011 berpeluang lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk memajukan hak dan penghidupan masyarakat hutan. Oleh karena pengaturan multilateral yang lemah dan goyah, kancah untuk aksi telah bergeser ke tingkat nasional. Akankah pernyataan mengenai hak selaras dengan pengakuan dalam kenyataan? Tatkala sekarang Masyarakat Adat dan masyarakat hutan memiliki lebih banyak wakil dalam perundingan, akankah mereka dibolehkan untuk bersuara dan apabila boleh, akankah didengar? Siapa yang akan bergabung dengan masyarakat hutan dan membantu memajukan suara mereka dan yang lebih penting, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat hutan sebagai mitra?

Laporan ini mengungkap keadaan hak dan tenurial hutan di dunia pada saat ini, menilai persoalan dan acara penting selama 2010 yang memungkinkan untuk memajukan hak dan penghidupan masyarakat setempat, dan mengenali pertanyaan dan tantangan penting yang akan dihadapi oleh dunia pada tahun 2011.

UCAPAN TERIMA KASIH:

Laporan ini merupakan hasil kerja Rights and Resources Initiative dan disusun oleh staf Rights and Resources Group berdasarkan masukan dari Mitra RRI, termasuk Forest Tends, Forest Peoples Programme, Intercooperation, FECOFUN, dan World Agroforestry Centre. Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Alastair Sarre atas bantuan penyuntingan yang tak ternilai.

Foto sampul muka oleh Survival International, lembaga yang memperjuangkan hak masyarakat adat. Empat puluh orang suku Dongria Kondh memblokir jalan menuju tempat yang direncanakan untuk penambangan oleh Vedanta Resources di Orissa, India dengan spanduk yang menyatakan, "Kami suku Dongria Kondh. Vedanta tidak dapat mengambil gunung kami." 2010.

Desain dan tata letak oleh Lomangino Studio (www.lomangino.com).

Diterjemahkan oleh Wiyanto Suroso.

DIGETAK PADA KERTAS BERSERTIFIKASI FOREST STEWARDSHIP COUNCIL.

Rights and Resources Initiative
Washington, D.C.

Hak cipta ©2011 Rights and Resources Initiative.
Perbanyak diizinkan asalkan menyebutkan sumber
ISBN 978-098-3367-40-6

DAFTAR ISI

- 1 SEKILAS TENTANG: HAK DAN SUMBERDAYA 2010 2011**

- 6 PENOLAKAN: KEKUATAN LOKAL, PENATAAN ULANG DUNIA, PELUANG BARU**

- 11 KEADAAN TENURIAL HUTAN PADA SAAT INI:
PERJUANGAN UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMPERTAHANKAN HAK-HAK**

- 16 KETEGANGAN DAN PERUBAHAN PADA TAHUN 2010: PERGESERAN PENTING
YANG MENENTUKAN HAK DAN PENGHIDUPAN**
- 16** Tiga Derajat dan Peningkatannya : Selatan Banjir, Utara tidak Peduli, dan MDG
Menjauh
- 18** Mengatasi “Penyerobotan”: Gerakan Hutan dan Mengendalikan Investasi
- 22** Pirolosis Cepat: Pasar dan Teknologi Hutan Meningkatkan Peluang bagi Produsen
Kecil
- 24** Kursi dalam Perundingan: Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat
Menyelamatkan dan Membentuk REDD
- 27** Pemantauan dan Telekomunikasi Dunia: Alat yang Nyaman, tetapi Memberdayakan?
- 28** Pelestarian Besar-besaran Kembali: Tetapi Masyarakat Setempat Menentang
karena Ingin Memegang Kendali
- 30** BRIC Datang: Penataan Ulang Dunia dan Tantangan Baru bagi Pembangunan

- 32 MENENGOK KE DEPAN KE TAHUN 2011: PERSOALAN LAMA, PELUANG BARU**
- 32** Akankah kerawanan pangan dan bencana iklim menggagalkan pembangunan
dan hak?
- 33** Akankah ODA bilateral untuk perubahan iklim menerapkan pengamanan dan
pertanggungjawaban?
- 34** Akankah standar dan pertanggungjawaban nasional diperkuat untuk memberi
sanksi kepada investasi swasta, REDD, dan LSM besar internasional?
- 34** Akankah Indonesia dan Republik Demokratik Kongo patuh untuk memperbaharui
tenurial lahan?
- 35** Akankah REDD ditata ulang untuk mendukung pelestarian oleh masyarakat dan
menangani adaptasi dan pertanian?
- 35** Siapa yang akan dipilih oleh masyarakat hutan dan Masyarakat Adat sebagai mitra?

- 37 CATATAN AKHIR**

KOTAK: CONTOH PENOLAKAN DAN KEMAJUAN PADA TAHUN 2010

- 7** Kotak 1: India: Gerakan Suku Memperoleh Kemenangan Bersejarah terhadap Perusahaan Multinational
- 12** Kotak 2: Kenya: Undang-undang Baru Mengantar Hak Perempuan atas Lahan
- 14** Kotak 3: Kolombia: Pengadilan Menanggukhan Penambangan oleh Militer di Lahan Penduduk Keturunan Afrika
- 17** Kotak 4: Mali: Petani Menentang Transaksi Lahan —“Mali tidak untuk Dijual!”
- 21** Kotak 5: Cina: Dibawa ke Mana CSR? Penyerobotan Secara Liar Lahan Hutan Menunjukkan Batas Standar Sukarela
- 23** Kotak 6: Indonesia: Landasan Masyarakat Sipil untuk Melindungi Hak-Hak Masyarakat dalam REDD
- 26** Kotak 7: Amerika Serikat: Mengakui First People, Kesalahan pada Masa Lalu, dan UNDRIP—Namun Tindakan Perlu Selaras Dengan Ucapan

GAMBAR

- 13** Gambar 1: Tenurial Hutan Menurut Kawasan, 2010
- 19** Gambar 2: Pertumbuhan Harga Komoditas, 2010
- 42** Gambar 3: Keadaan Tenurial Hutan Dunia, 2010

SINGKATAN DAN AKRONIM

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Indonesia
AS	Amerika Serikat
BRIC	Brazil, Rusia, India, dan Cina
CIHR	Conservation Initiative on Human Rights (Prakarsa Pelestarian Hak Asasi Manusia)
CNOP	Perhimpunan Organisasi Petani Nasional, Mali
COP	Conference of the Parties (Konferensi Para Pihak)
CSR	Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
FCPF	Forest Carbon Partnership Facility (Sarana Kemitraan Karbon Hutan)
FECOFUN	Federation of Community Forestry Users, Nepal (Federasi Pengguna Hutan Kemasyarakatan, Nepal)
FIP	Forest Investment Program (Program Investasi Hutan) Bank Dunia
FLEGT	Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan (Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan) UE
HuMa	Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi, Indonesia
IFC	International Finance Corporation (Badan Keuangan Internasional)
IIED	International Institute for Environment and Development (Lembaga Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan)
IMF	International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)
ITTO	International Tropical Timber Organization (Organisasi Kayu Tropis Internasional)
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Serikat Internasional untuk Pelestarian Alam)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG	Millennium Development Goal (Sasaran Pembangunan Milenium) PBB
NAPAS	National Adaptation Programmes of Action (Program Aksi Adaptasi Nasional)
NASA	National Aeronautics and Space Administration (Badan Aeronotika dan Angkasa Luar Nasional) AS
NTFPs	Non-Timber Forest Products (Hasil Hutan Bukan Kayu)
ODA	Official Development Assistance (Bantuan Pembangunan Resmi)
PBB	Perhimpunan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
REDD	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
REDD+	Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan + berbagai kegiatan a.l.pelestarian, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pemacuan cadangan karbon
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil (Perundingan mengenai Kelapa Sawit Berkelanjutan)
RRI	Rights and Resources Initiative (Prakarsa Hak dan Sumberdaya)
UE	Uni Eropa
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Perubahan Iklim PBB)
UNHRC	United Nations Human Rights Council (Dewan Hak Asasi Manusia PBB)
UN-REDD	United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Program Bersama PBB untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)

PENOLAKAN: KEKUATAN LOKAL, PENATAAN ULANG DUNIA, PELUANG BARU

Tahun 2010 merupakan tahun yang pelik karena berbagai kejadian buruk dan ketegangan dunia. Hal ini menarik dan dapat dipahami untuk menyimpulkan bahwa cerita utamanya ialah tentang bencana — banjir

besar, kebakaran, gempa bumi, dan tanah longsor; salah satu ‘tahun terpanas dalam sejarah’; krisis keuangan yang mendalam di belahan bumi Utara; hantaman harga pangan; dan kenyataan yang menyadarkan bahwa kita akan segera hidup dengan kenaikan suhu global rata-rata 3,5°C.

Walau menyedihkan, kisah-kisah ini bukannya tidak terduga ataupun yang paling menarik. Bahkan kisah yang paling menarik -dan menyedot perhatian- pada tahun 2010 ialah tumbuhnya peran organisasi masyarakat hutan, yang semakin mempengaruhi masa depan negara mereka dan nasib bumi ini.

Pergeseran halus kekuasaan, baik dalam bentuk protes ataupun keterlibatan konstruktif dalam tata kelola di seluruh dunia, ialah dikarenakan bertemunya berbagai kekuatan: meningkatnya tekanan terhadap lahan dan hutan milik masyarakat dan Masyarakat Adat oleh pendatang; sejarah panjang perlawanan dan penguatan lembaga masyarakat secara tidak kenal lelah; meningkatnya keterbukaan tata kelola nasional dan dunia atas hak dan suara masyarakat setempat; serta peluang pengaruh dari hasil perundingan dunia mengenai pembangunan dan perubahan iklim. Terwujudnya keyakinan dan kemampuan di kalangan masyarakat yang dalam sejarahnya terpinggirkan, dan semakin absah dan diterimanya prakarsa yang dirintis oleh masyarakat hutan . Langkah bersejarah ini mungkin paling tepat digambarkan dengan kemenangan besar gerakan suku di India yang memenangkan dukungan pemerintah melawan perusahaan multinasional (*lihat Kotak 1*).

Kebalikan dari perkembangan positif pada tahun 2010, ada kecenderungan yang mengganggu dari sebagian pemerintah yang melakukan langkah mundur dalam hal hak atas lahan setempat (yang sulit untuk diperjuangkan) dan dalam beberapa hal, memidanakan pembela rakyat.

1

INDIA: GERAKAN MASYARAKAT ADAT MEMPEROLEH KEMENANGAN BERSEJARAH MELAWAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL



Pada tahun bulan Agustus 2010, setelah bertahun-tahun memperoleh tekanan dari pegiat adat dengan dukungan dari kelompok hak asasi manusia India dan internasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan India Jairam Ramesh menolak penawaran Vedanta Resources untuk menambang bauksit di Bukit Niyamgiri yang dikeramatkan oleh Suku Dongria Kondh. Ramesh dan pemerintah negara bagian menghalangi penawaran tersebut dengan pertimbangan akan merugikan hak dan penghidupan hampir 8.000 orang Masyarakat Adat Dongria Kondh, yang mengakibatkan hilangnya habitat flora dan fauna langka, dan menghancurkan jalur gajah. Penambangan ini juga melanggar Undang-undang tentang Pelestarian Hutan, dan yang lebih penting, melanggar Undang-undang tentang Hak atas Hutan yang diundangkan pada tahun 2006 sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakadilan sejarah yang dilakukan terhadap penghuni hutan.

Keputusan yang disambut baik ini ditetapkan setelah berbulan-bulan Vedanta dan para pendukung industri melakukan lobi dengan tekanan tinggi, yang dibalas dengan pengerahan massa ke jalan dan kampanye informasi gencar yang digerakkan oleh banyak kelompok pegiat dan masyarakat.¹ Perjuangan Dongria Kondh telah mendapatkan dukungan dari seluruh dunia. Ketika mendengar keputusan dari Kementerian, seorang juru kampanye menyatakan, "Ini kemenangan yang dianggap mustahil oleh siapa pun ... sebuah ujian apakah kelompok masyarakat kecil yang terpinggirkan dapat bertahan melawan perusahaan multinasional yang besar."²

Keputusan Ramesh diberikan segera setelah diterbitkannya laporan kelompok pakar, yang diketuai oleh anggota Dewan Penasihat Nasional N. C. Saxena, bahwa "merupakan pandangan yang pasti bahwa membiarkan penambangan di daerah yang direncanakan untuk kontrak pertambangan ... akan mengguncang keyakinan masyarakat adat terhadap hukum atas lahan." Sekalipun demikian, dihormatinya temuan tim Saxena sangat tergantung pada independensi proses hukum India, yang ditegaskan lagi pada tanggal 19 Juli ketika dalam kasus pertambangan lainnya, Mahkamah Agung mengistilahkan kebijakan pembangunan dengan "picik." Sunita Narain, pegiat politik dan direktur Pusat Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup, menandakan bahwa kemenangan Dongria Kondh harus dipandang sebagai kemenangan Undang-Undang tentang Hak atas Hutan dan penolakan masyarakat setempat terhadap kekuatan perusahaan internasional.³

Sepanjang tahun ini, lembaga kehutanan masyarakat dan Masyarakat Adat merupakan para pemain yang kuat dalam perundingan dan bertindak global tentang hutan dan perubahan iklim – mereka sekarang memiliki perwakilan dalam dewan pengurus Program Bersama PBB untuk Pengurangan Emisi dari Partnership Facility (FCPF). Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/ UN-REDD), Program Investasi Hutan (Forest Investment Program/FIP) Bank Dunia, dan Sarana Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility /

Banyak negara telah menunjukkan kemajuan yang jelas menuju reformasi tata kelola hutan, tetapi yang lainnya masih belum.

FCPF). Kelompok-kelompok pemilik hak ini juga terwakili dalam lembaga-lembaga tersebut sebagai anggota, dengan sekurang-kurangnya 10 orang utusan nasional pada konvensi perubahan iklim yang diselenggarakan di Cancún, Meksiko, pada bulan November dan Desember. Walaupun perwakilan pada

dewan pengurus atau utusan tersebut biasanya tidak memiliki hak suara, namun telah memasukkan para pemangku kepentingan yang sebelumnya terpinggirkan ke dalam proses tersebut - dan pengaruhnya akan semakin dirasakan.

Bertentangan dengan perkembangan baik pada tahun 2010 ialah adanya kecenderungan mengganggu dari beberapa pemerintah yang melakukan langkah mundur dengan memakai kekerasan – menguasai hak atas lahan masyarakat setempat dan, dalam beberapa hal, memidanakan pembela rakyat. Pada tanggal 21 Desember, Bladimir Tapyuri— pemimpin Masyarakat Adat Peru — dihukum empat tahun penjara karena ikut serta dalam protes di Bagua pada tahun 2009 dan atas perannya dalam perdebatan berkaitan dengan hukum kehutanan Peru; tiga rekannya juga dipidanakan. Di Papua Nugini, pemerintah mengeluarkan peraturan lingkungan hidup yang baru yang menggerogoti habis hak milik masyarakat.⁴ Di Nepal, negara yang telah dikenal karena maju dalam kehutanan masyarakat, Menteri Pelestarian Hutan dan Lahan yang baru mengusulkan revisi atas Undang-Undang tentang Kehutanan untuk menaikkan pajak dan mengambil kembali hak atas kehutanan masyarakat.⁵ Pada bulan Oktober, polisi menanggapi protes damai besar-besaran dengan memenjarakan hampir 200 orang, yang menimbulkan luka berat pada beberapa orang.⁶

Pada tahun lalu, kami meramalkan bahwa 2010 akan menjadi tahun perhatian dan investasi pada hutan secara nasional dan dunia yang tidak ada bandingannya. Kami mengajukan empat pertanyaan penting untuk tahun 2010: Akankah ada kesepakatan dunia tentang perubahan iklim dan penegakan hukum secara nyata? Akankah

pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) benar-benar memperbaiki tata kelola hutan? Apakah Bank Dunia dan lembaga-lembaga pemberi bantuan pembangunan multilateral mendukung hak dan perwakilan Masyarakat Adat dan masyarakat hutan dalam tata kelola nasional dan dunia? Disamping itu, yang terpenting, siapakah yang akan menggerakkan perubahan, dan siapakah yang akan menetapkan cara memadukan daerah pedalaman dengan tatanan baru dunia mengenai hutan?

Dalam hal pertanyaan pertama, Cancún *memang* telah menghasilkan kesepakatan, termasuk pasal tentang REDD⁷, walaupun tidak ada pasal berupa janji untuk mengurangi emisi dalam jumlah besar, tidak ditetapkan cara kerja penegakan kesepakatan tersebut, dan pengamanannya hanya diletakkan pada lampiran, yang pelaksanaannya semata-mata bersifat pilihan. Walaupun demikian, kesepakatan Cancún merupakan langkah besar dalam mengupayakan bersama-sama sistem pembuatan kesepakatan tentang iklim PBB dan telah mempertimbangkan banyak saran dari Masyarakat Adat dan lembaga-lembaga kehutanan masyarakat.

Pada masa daerah pedalaman, hak masyarakat setempat sekadar diwariskan. Sekarang, setidaknya terjadi perebutan.

Dalam hal pertanyaan kedua, juri masih belum dilibatkan. Banyak negara telah menunjukkan perkembangan nyata menuju reformasi tata kelola hutan, tetapi yang lainnya masih belum. Secara keseluruhan, potensi REDD untuk menggerakkan keberhasilan reformasi tetap ada – dan cara yang akan dilakukan tetap merupakan pertanyaan besar; demikian pula peluangnya pada tahun 2011 dan sesudahnya.

Dalam hal pertanyaan ketiga, Bank Dunia dan lembaga multilateral lainnya menunjukkan kemajuan dalam hal hak Masyarakat Adat dan masyarakat hutan setempat – yang ditunjukkan dengan dukungan lebih tegas terhadap pengakuan atas hak dalam investasi mereka, keterwakilan Masyarakat Adat dan masyarakat hutan dalam tata kelola program, keterbukaan dalam persetujuan tidak terikat yang diberitahukan sebelumnya, dan meningkatnya penerimaan dari penetapan cara kerja pertanggungjawaban independen – yang diberikan contohnya oleh Dewan Pemeriksaan Bank Dunia. Selain itu, Bank Dunia terus berjuang mengamankan berdasarkan apa yang telah dijanjikannya sambil mempermudah penyediaan dana secara cepat. Yang lebih mencemaskan, Bank Dunia belum menyelidiki akibat yang dapat ditimbulkan oleh pasar karbon dunia terhadap tujuan utamanya untuk mengurangi kemiskinan, atau cara peminjaman dana untuk adaptasi yang jauh lebih ambisius dapat dengan mudah membalikkan kebijakan dan pengamanan yang telah

ditetapkan untuk REDD dan kehutanan. Masih belum jelas apakah (atau bagaimana) Bank Dunia akan benar-benar mematuhi persetujuan tidak terikat yang diberitahukan sebelumnya, dan apakah akan memelopori untuk mendorong penetapan proses REDD nasional yang dapat dipercaya.

Pertanyaan keempat — siapa yang menggerakkan dan siapa yang memutuskan?— masih menjadi inti perdebatan. Pada tahun 2010, ada penolakan penting oleh Masyarakat Adat dan masyarakat setempat terhadap tindakan yang tidak diinginkan di hutan dan lahan mereka. Pada masa di daerah pedalaman, hak setempat sekadar diwariskan dari waktu ke waktu. Sekarang, setidaknya, harus direbut. Tidak mengejutkan, perebutan ini berpusat pada siapa yang memiliki hutan, pohon, dan karbon, dan siapa yang berhak menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan nilai lahan yang meningkat ini. ■

KEADAAN TENURIAL HUTAN PADA SAAT INI: PERJUANGAN UNTUK MEWUJUDKAN DAN MENJAGA HAK

Tidak ada kemajuan nyata di dunia dalam hal perluasan kawasan hutan yang dimiliki oleh masyarakat setempat pada tahun 2010.

Tidak ada perkembangan nyata di tingkat global tentang perluasan kawasan hutan yang dimiliki masyarakat setempat pada tahun 2010 meskipun reformasi tersebut lebih dibutuhkan, dan lebih diterima, daripada sebelumnya. Di Cancún, misalnya, Lord Nicholas Stern berkata bahwa “kurangnya tenurial atas lahan

dan sumberdaya” merupakan tantangan yang perlu perhatian lebih besar dan mempersyaratkan “pelaksanaan reformasi lahan besar-besaran” untuk memperlambat deforestasi di Indonesia.⁸ Perjanjian Cancún “meminta negara-negara yang sedang berkembang ... untuk mengatasi ... persoalan tenurial lahan [dan] tata kelola hutan ...”⁹ Survei baru-baru ini terhadap 22 buah dokumen strategi REDD nasional menemukan bahwa 21 diantaranya menunjukkan bahwa tenurial lahan sebagai persoalan utama untuk diatasi.¹⁰

Sebaran kepemilikan dan hak atas lahan hutan di dunia tetap seperti yang kami laporkan pada tahun 2010 (*Gambar 1*). Kurangnya kemajuan ini sangat mengecewakan. Pernyataan-pernyataan tidak sesuai dengan tindakan di lapangan, dan ini menunjukkan kemunduran dalam perkembangan di dunia. Kepemilikan dan pengelolaan oleh masyarakat meningkat dua kali lipat antara tahun 1985 dan 2000 dan tingkat pengakuan rata-rata sekitar 5% per tahun antara tahun 2002 dan 2008. Bahkan yang lebih membingungkan ialah kenyataan bahwa 5% tingkat pengakuan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan tingkat “penyerobotan lahan,”¹¹ yang menurut Bank Dunia melonjak lebih dari 1000% pada tahun 2009.¹² PBB menyatakan bahwa tahun 2011 sebagai “Tahun Hutan Internasional” dengan tema “Hutan untuk Masyarakat.” Ratusan orang utusan pemerintah bertemu di New York pada pertengahan Januari untuk merayakannya. Akankah mereka menjalankan kembali reformasi tenurial hutan dan akankah pemerintah mereka menindaklanjutinya pada tahun 2011?

Pengakuan terbesar hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat masih tetap di Amerika Latin. Akan tetapi, di Afrika, hampir semua hutan terus diaku sebagai milik pemerintah walaupun ada berita bersejarah dari Lembah Kongo pada bulan Desember ketika Republik Kongo menerapkan perundang-undangan nasional

2

KENYA: UNDANG-UNDANG BARU MENGANTAR MENUJU HAK PEREMPUAN ATAS LAHAN



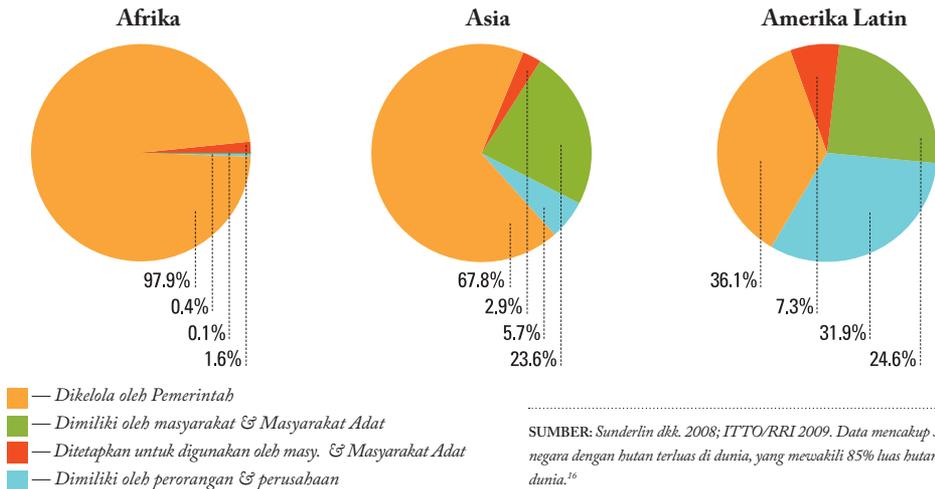
Undang-undang baru Kenya disahkan pada tahun 2010 dan diluncurkan tatanan baru yang tegas tentang hak atas lahan bagi perempuan secara lebih longgar untuk mengatasi jaminan hak atas lahan dan kesetaraan gender. Sebagai hasil dari kerja selama lebih dari satu dasawarsa, Kenya sekarang berada di garis terdepan gerakan Afrika sub-Sahara untuk mengarusutamakan kepedulian akan gender: berdasarkan undang-undang baru, perempuan di Kenya sekarang dapat memiliki dan mewarisi lahan dan dijamin diperlakukan setara dengan laki-laki berdasarkan undang-undang.¹³ Reformasi ini mengakhiri diskriminasi yang tersebar luas terhadap perempuan lajang, janda cerai mati dan hidup, yang sering dijunjung tinggi oleh hukum adat.¹⁴

Banyak kelompok berperan besar dalam mengantarkan hasil penting bersejarah ini, termasuk kelompok yang telah mapan seperti Persekutuan Lahan Kenya (Kenya Land Alliance), Pusat Lahan, Ekonomi, dan Hak Perempuan (the Center for Land, Economy, and Rights of Women), dan Gerakan Sabuk Hijau (the Green Belt Movement), dan kelompok lebih baru seperti kelompok pembelaan perempuan muda Warembo ni Yes (cabang dari Bunge la Mwananchi—Gerakan Sosial Perempuan). Warembo ni Yes memanfaatkan teknologi baru (seperti telepon genggam dan internet) dan cara yang biasa seperti forum masyarakat untuk memperkuat suara pendukung mereka. Dalam proses tersebut, para pemimpin perempuan yang berwatak pembaru bangkit untuk memajukan hak perempuan.

Tidak hanya hak perempuan atas lahan yang sekarang diperkokoh di Kenya, undang-undang baru tersebut menjamin bahwa perempuan akan mengisi sekurang-kurangnya sepertiga jabatan yang dipilih dan ditunjuk pada pemerintahan. Tantangannya sekarang ialah mewujudkan dalam kenyataan hak perempuan atas lahan yang baru saja diabadikan dalam undang-undang tersebut.

tentang hak Masyarakat Adat yang selaras dengan UNDRIP.¹⁵ Menutup kesenjangan antara pernyataan dan pengakuan itu memerlukan waktu meskipun apabila semua pihak berkomitmen penuh. Sejauh mana pernyataan akan diwujudkan menjadi pengakuan nyata merupakan salah satu pertanyaan besar pada tahun 2011, khususnya di Afrika dan Asia.

Bahkan, ini bukan hanya masalah mengesahkan tenurial lahan. Undang-undang yang sama yang mengesahkan hak sering menjadi hambatan untuk mewujudkannya secara penuh. Secara khusus, perempuan terus dirugikan dalam hal pengakuan dan

GAMBAR 1 TENURIAL HUTAN MENURUT KAWASAN, 2010


kemudahan dalam memperoleh keadilan berdasarkan prosedur sebagaimana terjadi sebelum diterapkannya undang-undang di Kenya (*lihat Kotak 2*).¹⁷ Penindasan yang telah berlangsung lama ini berlanjut ke tatanan iklim. Survei terhadap Program Aksi Adaptasi Nasional (*National Adaptation Programmes of Action/NAPA*) menemukan bahwa sepertiga Program Aksi tidak menyebutkan perempuan atau jenis kelamin dan sepertiga menyebutkan hanya secara formalitas. Sepertiga dari Program Aksi lainnya memperlakukan gender secara memadai, meskipun demikian, kebanyakan tidak melibatkan perempuan dalam proses persiapan.¹⁸

Hak atas lahan boleh saja dijamin oleh hukum, tetapi sangat dibatasi atau digerogoti oleh peraturan yang memberatkan dan sistem hukum yang tidak adil. Pada tahun 2010, RRI memulai kajian baru yang lebih rinci tentang 36 tatanan tenurial lahan yang mengakui dan mengatur hak masyarakat atas sumberdaya hutan di 15 negara, yang mencakup hampir 70% luas hutan tropis dunia.¹⁹ Dengan mengikuti pepatah “bagian tersulit terletak pada hal yang lebih rinci,” kajian tersebut mampu menjawab pertanyaan tentang pengakuan dan menelaah hak akses masyarakat; kewenangan untuk menetapkan keputusan mengenai pengelolaan hutan; apakah mereka dapat memanen kayu atau hasil hutan lain secara komersial; apakah mereka dapat melarang masuk pihak luar; apakah tatanan tenurial lahan memberikan hak untuk menyewakan, menjual atau menggunakan hutan

Undang-undang yang sama yang mengesabkan hak sering menjadi hambatan untuk mewujudkannya secara penuh.

3

KOLOMBIA: PENGADILAN MENANGGUHKAN PENAMBANGAN OLEH MILITER DI LAHAN PENDUDUK KETURUNAN AFRIKA



Pada bulan Maret 2010, Mahkamah Konstitusi Kolombia menghentikan proyek pertambangan tembaga terbesar di negara tersebut, yang telah dijalankan di lahan yang dimiliki secara sah oleh penduduk keturunan Afrika dan Masyarakat Adat. Bagi negara yang telah menempatkan pertambangan sebagai inti dari strategi pembangunan ekonominya, hal ini merupakan keputusan penting. Pada tahun 2005, dalam penawarannya untuk menarik minat penanaman modal asing secara langsung, pemerintah telah memberi Perusahaan Tambang Muriel izin penambangan selama 30 tahun seluas 16.000 hektar di wilayah Chocó, yang telah menjadi tempat tinggal penduduk keturunan Afrika dan Masyarakat Adat selama berabad-abad.²⁰

Izin ini diberikan tanpa bermusyawarah secara semestinya dengan masyarakat tentang dampak tambang tersebut terhadap lingkungan dan budaya, yang melanggar Undang-Undang Dasar 1991 dan Undang-Undang tentang Masyarakat Kulit Hitam 1993. Penambangan tidak hanya sangat mencemari saluran sungai di wilayah tersebut, namun satuan militer Kolombia juga dikirim untuk menjamin agar penambangan tetap berlangsung. Masyarakat setempat yang tidak diberi hak kelola dan ketakutan berjuang selama lima tahun di pengadilan rendah untuk menghentikan tambang tersebut. Pada tahun 2008, Pengadilan Rakyat Tetap secara resmi menyatakan bahwa Muriel bersalah karena melanggar hak penentuan sendiri dari masyarakat keturunan Afrika, Masyarakat Adat, dan Mestizo di wilayah tersebut.²¹ Keputusan Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi hak masyarakat Chocó untuk diajak bermusyawarah sepenuhnya mengenai proyek yang berdampak pada lahan dan kehidupan mereka.

Akan tetapi, sekarang Muriel bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan gencar menentang keputusan Mahkamah. Sejalan dengan pembalikan upaya yang tadinya menghadang masyarakat, maka babak baru perlawanan segera dimulai.

sebagai agunan; dan apakah hukum menjamin proses yang semestinya dan penggantian yang wajar bagi masyarakat apabila negara mencabut hak ini.

Hasil awal survei tersebut menunjukkan bahwa hambatan tetap ada, bahkan meskipun hak atas lahan diakui. Sebagai contoh, 92% tatanan tenurial lahan yang diteliti memungkinkan masyarakat untuk memanen kayu, tetapi 30% diantaranya melarang pembalakan komersial. Pada 64% tatanan tenurial lahan, masyarakat harus mematuhi rencana dan/atau

izin pengelolaan. Empat dari 15 negara (semuanya di Afrika) tidak melakukan proses yang semestinya ataupun menyediakan penggantian apabila negara mengambil lahan tersebut. Keseluruhan tatanan tenurial lahan yang dikaji di Amerika Latin rata-rata menyediakan seperangkat hak paling lengkap bagi Masyarakat Adat dan masyarakat setempat. Asia berada pada peringkat terkuat kedua dalam hal hak masyarakat, yang diikuti oleh Afrika.

Di sebagian besar negara Amerika Latin, banyak masyarakat hutan memusatkan perhatian pada upaya melindungi hasil yang telah dicapai dalam hak atas lahan, khususnya dalam menghadapi tekanan yang meningkat dari kepentingan untuk pertambangan, pertanian, agroindustri, dan pelestarian, sebagaimana halnya penduduk keturunan Afrika di Kolombia yang diuraikan pada *Kotak 3*. Juga ada kebutuhan untuk memberlakukan ketentuan hukum yang akan mengarahkan pemilik hak atas lahan dalam mengelola hutan mereka dan mencari penghasilan darinya. Di sebagian besar Afrika, titik beratnya masih pada upaya memperoleh pengakuan hukum atas hak sejarah walaupun di (sedikit) negara yang hukumnya mengakui hak semacam itu, perhatian telah bergeser ke pelaksanaannya. Di Asia, titik beratnya ialah pada pengakuan undang-undang di beberapa negara, seperti Indonesia dan Nepal sedangkan di negara lain, seperti Cina, perhatian lebih diberikan pada hak untuk menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya lahan, dengan menjamin perlindungan bagi Masyarakat Adat minoritas, dan memperbesar hak bagi perempuan. ■

KETEGANGAN DAN PERUBAHAN PADA TAHUN 2010: PERGESERAN PENTING YANG MENENTUKAN HAK DAN PENGHIDUPAN

“Oleh karena itu, perjuangan untuk membatasi pemanasan global pada tingkat yang dapat ditolerir telah berakhir.”

The Economist,
25 November 2010²²

Pada tahun 2010, pemerintah, investor, lembaga konservasi, dan masyarakat mengakui peningkatan kelangkaan dan nilai hutan, dan kendali yang lebih besar, dan terkadang lebih wajar, yang perlu direbut. Bagian ini menjelaskan pergeseran struktural besar pada tahun tersebut yang menentukan berbagai kemungkinan dalam mengamankan hak masyarakat dan memperbaiki penghidupan hutan setempat pada masa mendatang.

► TIGA DERAJAT DAN PENINGKATANNYA: SELATAN BANJIR, UTARA TIDAK PEDULI, DAN MDG MENJAUH

Banjir besar di Pakistan dan Cina, kemarau yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amazon, dan tanah longsor di Meksiko dan Amerika Tengah menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim telah menyebabkan penderitaan hebat di negara-negara yang sedang berkembang. Di sisi lain, negara-negara Utara, yang tampaknya sedang membiasakan diri dengan gagasan perubahan iklim, menurunkan kepedulian dan ambisi mereka dan bukan taraf hidup mereka. Banyak negara, terutama Amerika Serikat, gagal meloloskan perundang-undangan tentang perubahan iklim ataupun sangat mengurangi cakupan hukum tersebut. Ini terjadi meskipun ada bukti yang jelas bahwa emisi global tetap pada alur bisnis seperti biasa dan bahwa, bahkan apabila seluruh negara memenuhi sasaran masing-masing yang telah disepakati, suhu global rata-rata akan tetap naik sebesar sekurang-kurangnya 3,5°C dalam jangka panjang,²³ yang menyebabkan lebih banyak banjir yang membawa bencana, kebakaran, kekeringan, dan ketidakmenentuan cuaca—yang semuanya akan, terutama berdampak terhadap rakyat miskin di negara-negara yang

“Dua derajat adalah impian yang diinginkan.”

Bob Wilson, Ketua Peneliti,
Departemen Lingkungan, Pangan
dan Urusan Perdesaan (Inggris)

4

MALI: PETANI MENENTANG TRANSAKSI LAHAN — “MALI TIDAK UNTUK DIJUAL!”



Uang minyak Afrika Utara mengalir ke Mali, salah satu negara termiskin di dunia, untuk mendanai pembebasan lahan secara rahasia dan bermasalah. Sejak 2008, kesepakatan tertutup besar-besaran telah menyerahkan lebih dari 300.000 hektar di Segou, kawasan pertanian

utama di negara tersebut,²⁴ kepada perusahaan besar pertanian dan bahan bakar nabati (BBN) setempat maupun asing. Sejauh ini, pengusiran dengan kekerasan dan penggusuran tanpa penggantian atau dengan penggantian tidak wajar telah merupakan hal biasa.

Para petani Segou mengorganisasi diri melawan apa yang mereka lihat sebagai pengambilalihan paksa atas lahan mereka yang didukung oleh pemerintah Mali. Pada bulan November 2010, penggembala, ahli pertanian, dan lembaga masyarakat sipil dikerahkan ke kota Kolongotomo untuk mengancam transaksi tersebut dan meminta ganti-rugi dari pemerintah pusat.

Perhimpunan Organisasi Petani Nasional (*Coordination Nationale des Organisations Paysannes*) dan Perserikatan Pekerja Pertanian Niger (*Syndicat des Exploitants Agricoles de l'Office du Niger*), penyelenggara-bersama Forum Kolongotomo, mengancam ketiadaan musyawarah dengan pemangku kepentingan setempat dalam penetapan lahan untuk disewakan dan ketiadaan kejelasan tentang bagaimana masyarakat setempat akan memperoleh manfaat. Dalam hal sewa selama 50 tahun yang diberikan kepada Malibya Agricole, misalnya, kontrak tidak menetapkan manfaat bagi masyarakat setempat atau menetapkan tambahan pendapatan bagi negara; juga tidak mengharuskan sebagian hasilnya diperuntukkan menetap di dalam negeri. Jadi, mustahil bagi masyarakat atau pemerintah setempat untuk menegakkan ketentuan tentang manfaat, menjamin hak masyarakat setempat, ataupun melacak penerimaan atau pembagian pendapatan. Hal ini tampak sebagai masalah umum dalam transaksi yang diadakan di Mali dan negara-negara Sahel lainnya yang melibatkan dana pemerintah Saudi ataupun investasi persatuan negara Islam sekawasan.²⁷

“Negara-bangsa telah mulai merosot, kehilangan kekuatannya menghadapi keuntungan dari swasta.”

Madiodio Niasse, Direktur, *Internasional Tanah Koalisi (Coalition foncière internationale)*²⁵

Tidak akan ada pilihan lain, kecuali mengangkat senjata dan mempertahankan diri.”

Ibrahim Coulibailly, Ketua, *Perhimpunan Organisasi Petani Nasional (CNOP)*²⁶

sedang berkembang, yang paling kecil memberi andil terhadap terjadinya masalah dan paling tidak mampu melindungi diri dari dampak tersebut.

Apa pun seluruh pernyataan umum tersebut, sebaliknya perkembangan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa tanggapan terhadap perubahan iklim, bencana besar, dan krisis keamanan mungkin dilakukan dengan mengabaikan keinginan untuk mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (Milenium Development Goals/MDGs),

khususnya yang terkait dengan pengurangan kemiskinan. Pertemuan puncak PBB dan laporan terkait yang mengevaluasi kemajuan pencapaian MDGs, yang diselesaikan pada bulan September 2010, mencatat sedikit pencapaian. Lebih tepatnya, ini menunjukkan keprihatinan bahwa jumlah masyarakat yang hidup sangat miskin dan lapar telah melampaui satu milyar dan bahwa kelaparan dan kekurangan gizi telah bertambah dari tahun 2007 hingga 2009, yang sebagian diantaranya lebih buruk dibandingkan dengan hasil sebelumnya.

Program Pangan Dunia (*World Food Programme*) menunjukkan keprihatinan serupa pada pertemuan puncak tentang ketahanan pangan, yang diselenggarakan pada bulan November 2009. Ada tanda-tanda bahwa keadaan darurat penyediaan pangan di beberapa tempat akan terus terjadi, yang mungkin juga terjadi krisis dunia. Pada tahun 2050, jumlah masyarakat yang berisiko rawan pangan karena perubahan iklim diperkirakan naik sebesar 10-20%, lebih tinggi daripada yang diduga apabila tanpa terjadi perubahan iklim.²⁸

Kondisi yang membuat lebih buruk, , semakin jelas bahwa US\$100 milyar berupa bantuan pembangunan resmi yang baru-baru ini dijanjikan untuk perubahan iklim, yang semestinya baru dan sebagai tambahan, akan seperti biasanya adalah nihil. Germanwatch mengkaji pendanaan bantuan bilateral Jerman pada tahun 2010 dan menemukan hanya US\$70 juta berupa pendanaan baru dan tambahan untuk perubahan iklim, dan sisanya sekadar relokasi dari komitmen yang ada.²⁹ Penurunan suku bunga dan penjadwalan kembali pengembalian utang segera setelah krisis keuangan dunia berarti bahwa anggaran operasional lembaga donor bilateral tradisional akan menghadapi kendala yang bahkan lebih besar pada tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya.

Ada juga risiko bahwa pendanaan perubahan iklim akan sekadar mengganti alat bantu, kemampuan, dan cara yang telah dikembangkan selama beberapa dasawarsa untuk mengatasi kemiskinan dengan program-program baru yang dimulai dari nol, dengan kemungkinan kehilangan pembelajaran yang dilakukan dengan bersusah-payah. Apakah dunia telah menyerah dengan persoalan pembangunan dan pengurangan kemiskinan, dan apakah sekarang bergeser sekadar melokalisir dan mengendalikan dampak kegagalannya untuk menghadapi perubahan iklim?

► MENGATASI 'PENYEROBOTAN': GERAKAN HUTAN MENETAPKAN STANDAR DAN MENGENDALIKAN INVESTASI

Pembebasan dan 'penyerobotan' lahan pertanian dan lahan hutan di negara yang sedang berkembang berlanjut – dan dapat diperdebatkan meluas – pada tahun 2010. Harga gandum melonjak 30% pada bulan Agustus, dan harga bahan pangan pokok telah melampaui harga puncak sebelumnya pada tahun 2008 – yang memicu

GAMBAR 2 PERTUMBUHAN HARGA KOMODITAS, 2010


SUMBER: *The Economist*, 2010.³⁰

setidaknya 30 kerusuhan pangan di seluruh dunia.³¹ Sesuai dengan perkiraan untuk seluruh dunia, laporan baru dari Departemen Pertanian AS memperkirakan penurunan besar produksi biji-bijian di AS pada tahun 2011, dan bahkan harga pangan lebih tinggi pada tahun 2011.³² Minyak, logam, komoditas pertanian bukan pangan (termasuk kayu) dan lainnya menunjukkan kenaikan harga serupa di pertengahan kedua 2010 (*lihat Gambar 2*). Kerentanan harga pangan dunia dan hubungannya dengan hutan, perubahan iklim, dan pergolakan politik dipuncaki secara luar biasa dengan kebakaran hutan yang terjadi di Rusia pada bulan Juli, yang melanda lahan pertanian dan menghancurkan kira-kira 20% produksi gandum. Pemerintah Rusia selanjutnya melarang ekspor gandum, yang menyebabkan harga gandum melambung di pasar dunia. Akibatnya, Mozambik (yang mengimpor 70% konsumsi gandumnya) menaikkan harga roti, yang memicu kerusuhan karena pangan dan menyebabkan kematian tujuh orang.³³

Permintaan dunia akan lahan pertanian meningkat nyata pada tahun 2010: kajian Bank Dunia mengenai penyerobotan lahan yang diterbitkan pada bulan September menemukan bahwa setidaknya 45 juta hektar transaksi perluasan lahan pertanian berskala besar diumumkan pada tahun 2009, dibandingkan dengan rata-rata 4 juta hektar per tahun sebelum 2008.³⁴ Kajian tersebut mengungkapkan pendekatan oportunistik yang dipakai oleh beberapa investor – yang menjadikan sasaran negara yang sedang

“Tidak adanya tindakan untuk menghentikan spekulasi atas komoditas pertanian dan kebijakan bahan bakar nabati yang berkelanjutan berarti membuka jalan untuk mengulang krisis harga pangan 2008 pada tahun 2010 atau 2011.”

Olivier de Schutter, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan

berkembang yang lemah dalam hak atas lahan setempat dan pemerintahnya merasa berhak untuk melakukan transaksi tersebut meskipun ditentang oleh masyarakat setempat. Gejala tersebut tidak terbatas pada lahan pertanian, yang memicu peningkatan perselisihan dan penolakan oleh petani, penghuni hutan, dan pemburu maupun peramu, sebagaimana ditunjukkan dengan protes di Mali (*Kotak 4*) dan India (*Kotak 1*).

Penyerobotan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara menjadi contoh hubungan antara hutan, pangan, perselisihan, dan penolakan. Pada tahun 2010, upaya untuk meningkatkan kendali masyarakat atas lahan adat mengalami ancaman oleh pemerintah yang kuat dan kepentingan komersial. Bertentangan dengan pengakuan industri, 55-60% penyerobotan lahan di kawasan tersebut terjadi dengan mengorbankan hutan tropis yang ada,³⁵ yang dicapai dengan merampas hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat atas lahan mereka. Di Indonesia, Program Masyarakat Hutan (*Forest Peoples Programme/FPP*) bersama dengan Sawitwatch, AMAN, HuMa, dan organisasi lainnya di Indonesia,³⁶ sedang mendorong industri untuk lebih ketat dan mengupayakan kendali terhadap produksi dan perdagangan minyak sawit untuk menjadikannya berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.³⁷

Sebagai bagian dari strategi mereka termasuk menekan Perundingan mengenai Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO*), organisasi yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan minyak sawit pada tahun 2002 dan yang mencakup perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar Kelompok Wilmar, untuk menyampaikan tujuannya, yaitu memastikan produksi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial oleh para anggotanya.³⁸ Di bawah tekanan FPP dan lembaga-lembaga setempat, Bank Dunia memulai kajian terinci tentang sektor minyak sawit, setelah audit independen tahun lalu atas pendanaan dari Badan Keuangan Internasional (*International Finance Corporation/IFC*) kepada pegawai Kelompok Wilmar yang menunjukkan pelanggaran standar berulang kali oleh pegawai IFC. Akibat tindakan ini, Presiden Bank Dunia mula-mula meminta IFC, dan kemudian seluruh Kelompok Bank Dunia, untuk menghentikan pendanaan terhadap sektor minyak sawit di seluruh dunia. Bank Dunia juga sekarang mengembangkan strategi pendanaan baru yang menyeluruh untuk minyak sawit dan selanjutnya untuk komoditas penting lainnya seperti coklat (kaka) dan kedelai.

Contoh ini, bersama dengan contoh investasi Stora Enso di Cina yang disoroti pada *Kotak 5*, menunjukkan kekuatan maupun batas standar sukarela internasional. Para investor besar dari barat bertanggung jawab atas pelaksanaannya, tetapi saham mereka di pasar dunia menurun, dan tuntutan meningkat dengan cepat di negara-negara yang sedang berkembang dan berpendapatan menengah yang tanpa memiliki standar serupa ataupun kemungkinan tekanan dari konsumen. Ini semua memerlukan perjuangan lebih besar ke depan dengan berkurangnya investor yang cermat dan

5

CINA: DIBAWA KE MANA CSR? PENYEROBOTAN SECARA LIAR LAHAN HUTAN MENUNJUKKAN BATAS STANDAR SUKARELA



Atas dukungan para pejabat setempat dan pedagang perantara lainnya, perusahaan raksasa kertas dunia Stora Enso memegang kendali atas ribuan hektar lahan hutan di Wilayah Otonom Guangxi di Cina selatan secara liar untuk perkebunan leda

(*eucalyptus*). Meski dapat disanggah, Stora Enso merupakan salah satu perusahaan kertas paling hijau di dunia dan memiliki komitmen yang telah diakui terhadap asas tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*).

Dengan bertindak atas nama Stora Enso, para pedagang perantara sering melanggar hukum dalam upaya mereka untuk mengamankan lahan; berkali-kali mereka mengancam petani secara fisik yang menolak keras menyerahkan hak mereka. Dalam proses tersebut, mereka menggerogoti tindakan pemerintah pusat Cina baru-baru ini yang mengizinkan kelompok usaha bersama untuk menyerahkan kendali atas lahan kepada keluarga petani perorangan, yang mengelola 100 juta hektar dan memberi manfaat kepada sekitar 400 juta orang. Reformasi tersebut juga menuntut keikutsertaan aktif keluarga petani dalam tahapan pengambilan keputusan yang menentukan transaksi atas hutan milik bersama.

Menurut Li Ping, penulis-bersama kajian gabungan RRI dan *Rural Development Institute*,³⁹ hal ini “tidak dapat diterima bahwa tindakan penting dan bersejarah ini, yang dirancang untuk menjamin hak petani atas lahan hutan mereka, telah demikian disalahgunakan.” Meskipun telah diingatkan pada tahun 2006 tentang penyimpangan hukum dalam transaksi lahannya, Stora Enso mulai memeriksa keabsahan kontrak sewa-guna usahanya di Guangxi pada akhir 2010, yang mengakui kekusutan dan risiko hukum dan politik yang sesungguhnya.

“Tidak dapat diterima bahwa tindakan penting dan bersejarah ini, yang dirancang untuk menjamin hak petani atas lahan hutan mereka, telah demikian disalahgunakan.”

Li Ping, *Rural Development Institute*

pemerintah yang bersedia bekerjasama dan akhirnya menunjukkan bahwa standar nasional dan sistem pertanggungjawaban perlu dimantapkan dan dijalankan sepenuhnya agar hak diakui, dan kepentingan dari semuanya – pemilik, investor, dan pemerintah – terlindungi.

► PIROLOSIS CEPAT: PASAR DAN TEKNOLOGI HUTAN MENINGKATKAN PELUANG BAGI PRODUSEN KECIL

Pemintaan sedang bergeser besar-besaran ke pasar dalam negeri dan kawasan di negara-negara yang sedang berkembang. Lebih kurang 80% pertumbuhan pasar dalam dasawarsa mendatang akan berada di negara yang sedang berkembang.

Sekarang sedang berlangsung peralihan besar-besaran di industri kehutanan, khususnya di negara yang sedang berkembang, yang memberikan tanda akan adanya peluang baru bagi pemilik dan usaha kehutanan masyarakat. Pemilikan dan produksi usaha kecil telah lama menonjol di AS dan Eropa. Pada tahun 2010, hutan pribadi di AS menghasilkan tujuh kali lipat PDB per acre (4.050 m²) sebagai hutan rakyat yang dikelola secara komersial,⁴⁰ dan 90% perusahaan kehutanan di Eropa telah lama mempekerjakan kurang dari 20 orang pekerja.

Yang tidak kalah mengesankan, ketika hak diakui di Cina dan Meksiko, produksi dan usaha kecil juga tumbuh subur. Data baru dari Cina menunjukkan bahwa 90% nilai industri furnitur dalam negeri dan ekspor berasal dari usaha kecil dan pemilik lahan kecil.

Lima perubahan besar menunjukkan bahwa perubahan ini akan melanda negara yang sedang berkembang pada tahun-tahun mendatang. Pertama, permintaan sedang bergeser besar-besaran ke pasar dalam negeri dan kawasan di negara-negara yang sedang berkembang. Lebih kurang 80% pertumbuhan pasar dalam dasawarsa mendatang akan berada di negara yang sedang berkembang,⁴¹ yang akan menghasilkan peluang baru bagi pemasok setempat. Perhimpunan Hasil Kayu Afrika (*Africa Wood Products Association*) menyelenggarakan perundingan kedua dengan ITTO tentang pergeseran fokus perdagangan kayu Afrika sub-Sahara dari pasar ekspor tradisional ke pasar dalam negeri dan kawasan. Kedua, pasar untuk hasil hutan bukan kayu meluas, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor, acapkali seiring dengan jalur budaya atau penyebaran penduduk – untuk kebutuhan pengobatan dan botani, pangan dan rempah-rempah, serat, pewarna, dan hiasan. Permintaan atas beberapa produk seperti buah Amazon açai melambung, baik di Brazil maupun dunia. Negara bagian Pará mengeksport 380 ton buah pada tahun 2002, dan naik menjadi 9.400 ton pada tahun 2010 seiring naiknya konsumsi setempat, yang menciptakan peluang usaha baru.⁴²

Ketiga, lahan hutan menjadi lebih mahal dan persil-persil besar yang belum dimiliki atau tersedia semakin langka – yang mendorong investor kayu dan perkebunan untuk mempertimbangkan model-model usaha yang bersumber dari masyarakat dan pemilik lahan kecil. Bersamaan dengan tahap pematangan Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan (*Forest Law*

Enforcement, Governance and Trade Action Plan/FLEGT) Uni Eropa dan prakarsa sertifikasi, hal ini akan berlanjut untuk membatasi dan membentuk berbagai model usaha dan pola investasi.

Keempat, sebagai akibat krisis keuangan dunia, jelaslah bahwa hak pengusahaan kayu tropis berskala industri maupun industrinya semakin merosot. Keduanya tidak menarik bagi investasi dalam bidang pengolahan yang bernilai cukup tinggi, yang semakin diakui sebagai tidak berkelanjutan, dan sering dikonversi menjadi perkebunan ataupun pertanian. Campuran baru berbahan kayu dan plastik, kayu yang dipanaskan, dan pengganti kayu mengambil alih pangsa pasar dan disediakan sebagai pilihan yang “lebih hijau”. Permintaan akan perkebunan energi dan komoditas lain yang semakin meningkat, meski untung-untungan, menjadikan upaya untuk mempertahankan pendapatan sulit bagi pengeksport kayu tropis,⁴³ dan syarat yang

6

INDONESIA: LANDASAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT DALAM REDD



Pada bulan Mei 2011, pemerintah Norwegia dan Indonesia mengumumkan kemitraan bilateral baru tentang REDD. Sebagai bagian dari kemitraan ini, Norwegia akan menyediakan hingga US\$1 miliar melalui skema pendanaan jalur-cepat yang sebanding dengan penurunan emisi gas rumah kaca yang dicapai dengan memperlambat deforestasi di Indonesia.⁴⁴ Kemudian pada tahun yang sama, pemerintah Australia bergabung dalam kemitraan tersebut, dengan menyumbang US\$45 juta.⁴⁵

Surat Minat yang meresmikan kemitraan antara Norwegia dan Indonesia menjanjikan “penangguhan selama dua tahun atas seluruh hak pengusahaan baru konversi lahan gambut dan hutan alam.” Hal ini mengenakan pembekuan sementara atas perluasan perkebunan kelapa sawit dan pertanian berskala besar lainnya yang sekarang menjadi penggerak utama deforestasi di Indonesia.

Masyarakat sipil Indonesia benar-benar khawatir jika persoalan pokok hak-hak kepemilikan lahan dan pengamanan hutan tidak diselesaikan terlebih dahulu, skema ini maupun skema REDD lainnya akan memperburuk perselisihan tentang hutan yang telah memanas. Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (yang diantara anggotanya mencakup mitra RRI, yaitu HuMa, Sawitwatch, dan AMAN) sedang mendorong hak yang lebih besar bagi masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan dalam usulan skema hutan untuk karbon.⁴⁶ Data pemerintah Indonesia sendiri maupun Bank Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 25.000 desa dan diperkirakan 50-70 juta orang (hampir seperempat dari jumlah penduduk) hidup di dalam dan sekitar “hutan negara”—hanya 12% diantaranya yang telah disertifikatkan sehingga menjadikan daerah sisanya tidak memiliki status hukum yang pasti—sekalipun demikian, rancangan strategi REDD nasional tidak mengakui arti pentingnya kerangka kerja berdasarkan hak.⁴⁷

semakin banyak bagi kayu sah atau bersertifikasi menambah biaya, yang menjadikan model usaha ini kurang menarik. Pada saat bersamaan, pengakuan FLEGT tentang pentingnya pengabsahan industri kecil semakin bertambah. Usaha besar bukan lagi merupakan satu-satunya pelaku yang absah.

Perubahan terakhir ialah dalam teknologi kayu dan pilihan skala produksi. Teknologi baru bahan bakar nabati, termasuk pirolisis cepat, yang mengubah serat kayu cair menjadi energi, sangat meningkatkan efisiensi konversi dan lebih menyukai produksi dalam jumlah kecil yang mempertahankan pengangkutan berbiaya rendah dan memungkinkan sumber pasokan yang lebih luas. Teknologi ini menawarkan kemungkinan manfaat tambahan dari pemasangan aliran listrik setempat. Industri vinir Cina sekarang mengupas kayu bulat hingga ke empulur yang hanya bergaris tengah beberapa sentimeter, berarti sepersepuluh standar industri biasa, yang lebih menyukai wanatani petani kecil dan pilihan lain seperti bambu. Tidak perlu lagi harus berskala besar untuk mampu bersaing.⁴⁸ Jangkauan pasar dan model usaha baru yang luas sedang bermunculan yang dapat mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan sambil menciptakan lapangan kerja setempat, produk yang beraneka ragam, dan perekonomian setempat yang lebih ulet.

“Masyarakat Adat tidak menjalankan REDD karena uang. Itu hal yang sangat penting. Mereka melakukan itu untuk hak mereka.”

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal, AMAN⁹

► KURSI DALAM PERUNDINGAN: MASYARAKAT ADAT DAN MASYARAKAT SETEMPAT MENYELAMATKAN DAN MEMBENTUK REDD

Sejak awalnya, REDD dipandang sebagai harapan dan sesuatu yang berlebih-lebihan. Banyak yang mengatakan bahwa REDD akan murah (dibandingkan dengan pilihan

lain), cepat (mengingat rencana semula meminta negara-negara untuk ‘siap’ sebelum Kopenhagen), dan mudah (dibandingkan dengan kesulitan untuk mencapai penurunan di sektor-sektor lain di Utara tercemar). Akan tetapi, analisis baru menunjukkan bahwa REDD tidak akan semurah yang semula diperkirakan;⁵⁰ hanya ada upaya terbatas untuk mengubah bisnis seperti biasa; pasar karbon dunia muncul secara lambat; dan ada sedikit pemaksaan, dan banyak keraguan, bagi sektor swasta untuk membeli “penggantian kerugian” REDD+.

Banyak perwakilan Masyarakat Adat dan masyarakat hutan semula memusuhi REDD karena ketakutan bahwa akan semakin menghalangi hak mereka atas hutan – dan masih banyak yang demikian. Semboyan seperti “Tak Ada Hak – Tak Ada REDD” menonjol dalam banyak kecaman internasional tentang REDD. Sekalipun demikian, ketika rincian REDD mulai mengguncang dan pesona imbalan tumbuh,

pernyataan berkembang menjadi “Hak, kemudian REDD” ketika sebagian perwakilan Masyarakat Adat dan masyarakat hutan mulai melihat kebalikannya dalam REDD. Sayangnya, kelompok-kelompok yang sama ini tanpa henti mendorong pendekatan berdasarkan hak dalam REDD yang meliputi persetujuan tidak terikat yang diberitahukan sebelumnya dan keikutsertaan penuh dalam pengembangan strategi REDD+, yaitu mereka yang berhasil dalam penolakan dihadiah lebih banyak suara, pengaruh politik, dan kursi dalam perundingan.

Akibat pembelaan yang canggih dan sulit dilawan, perundingan internasional dan dana multilateral yang mengarahkan REDD+ telah membuka pintunya untuk mengikutsertakan lebih banyak perwakilan Masyarakat Adat dan masyarakat hutan dalam proses penetapan

keputusannya. Pada tahun 2010, Masyarakat Adat dan masyarakat hutan memiliki lebih banyak kursi dalam perundingan. Lebih dari 500 orang Masyarakat Adat dari Afrika, Asia dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Arktik, dan Amerika Utara hadir di Cancún, yang menyelenggarakan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk memastikan bahwa keprihatinan mereka diterima oleh COP-16.⁵¹ Masyarakat Adat dan lembaga masyarakat sipil sekarang memiliki pengamat di dewan pengurus Kemitraan REDD+ (*REDD+ Partnership*), Program Investasi Hutan (*Forest Investment Program/ FIP*) Bank Dunia, Sarana Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility/FCPF*), dan hak suara penuh pada Dewan Kebijakan REDD-PBB (*UN-REDD Policy Board*).

Kemenangan masyarakat sipil ini berdampak penting bagi keberhasilan program REDD. Hutan terdapat di beragam bentang darat, dengan kebutuhan yang saling berebut sumberdaya yang terdapat di atas, di bawah, dan di dalam hutan. Kebijakan yang mendorong pengambilan kayu untuk industri, pertanian, dan pertambangan memicu deforestasi di sebagian besar dunia.

Kajian yang baru menunjukkan bahwa sejak tahun 1990, 80 negara telah mengubah arah dari deforestasi ke reboisasi melalui pembaruan kebijakan yang menitikberatkan pada tenurial lahan yang terjamin, berinvestasi pada penanaman, dan mengurangi peraturan yang membebani pemilik lahan kecil.⁵² Jelas bahwa diperlukan kebijakan, bukan sekadar pemberian imbalan. Oleh karena itu, petunjuk pelaksanaan kebijakan canggih yang mewajibkan untuk memperlambat deforestasi dan meningkatkan penyimpanan karbon harus diberitahukan dengan kajian yang mantap tentang penyebab deforestasi maupun pengetahuan dan kepedulian para pengelola hutan tradisional. Upaya ini akan berhasil hanya jika REDD diperluas sehingga mencakup banyak tujuan yang lebih dari sekadar deforestasi –seperti adaptasi, ketahanan pangan, kemiskinan, dan kerentanan.

“Sementara ini, REDD merupakan ancaman. Kami ingin mengubah ancaman ini menjadi peluang.”

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal, AMAN⁶⁹

7

AMERIKA SERIKAT: MENGAKUI FIRST PEOPLES, KESALAHAN MASA LALU, DAN UNDRIP – TETAPI DIBUTUHKAN TINDAKAN UNTUK MENYELARASKAN DENGAN PERNYATAAN



Pada tahun 1996, setelah bertahun-tahun tanpa tindakan dan salah urus pemerintah, Elouise Cobell (Suku Blackfeet, Montana) mengajukan gugatan atas nama masyarakatnya melawan pemerintah AS karena menahan royalti dari penambangan mineral dan minyak di lahan masyarakat Indian. Hal ini memacu gugatan massal (class action) selama 14 tahun yang saling berbantahan dan bertentangan, yang akhirnya diselesaikan pada bulan Desember 2010. Undang-undang tentang Penyelesaian Gugatan (Claims Resolution Act) disahkan, yang menganggarkan US\$1,9 miliar untuk menyelesaikan gugatan awal dan lebih dari US\$1 miliar berupa pendapatan dari industri air.⁵³

Disamping permukiman bersejarah ini, perubahan berlanjut menjadi sulit untuk dilawan dan sulit untuk diperoleh. Pada tahun 2010, terjadi penolakan di seluruh wilayah Indian: laki-laki, perempuan, dan pemuda memprotes penggunaan identitas Indian secara terus-menerus sebagai maskot di Colorado, Wisconsin, dan Oregon;⁵⁴ para tetua bekerja untuk menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang hampir punah di Alaska;⁵⁵ dan 300 lebih kelompok masyarakat Indian Amerika melanjutkan pengajuan permohonan pengakuan dari pemerintah federal.⁵⁶

Demikian juga pada tahun 2010, setelah beberapa dasawarsa pengerahan politik oleh Masyarakat Adat, pemerintah AS akhirnya mendukung UNDRIP dan berjanji untuk melaksanakannya — mengikuti Kanada dan Selandia Baru, yang juga mendukung UNDRIP pada tahun 2010. Ketika membuat janji bersejarah dan sangat penting ini, Presiden Barack Obama menyatakan bahwa, "*harapan [pernyataan] ini menegaskan — termasuk penghormatan kepada lembaga dan kekayaan budaya Masyarakat Adat (Native Peoples) — merupakan hal-hal yang kita harus selalu berupaya memenuhinya ... yang jauh lebih berarti daripada kata-kata — yang jauh lebih berarti daripada penyelesaian ataupun pernyataan apa pun — merupakan tindakan untuk menyelaraskan dengan kata-kata tersebut.*"⁵⁷

Secara keseluruhan, perkembangan ini merupakan tanda kemajuan yang dahsyat. Memasukkan kelompok-kelompok yang dalam sejarahnya terpinggirkan ke dalam jajaran tata kelola dunia bukanlah kemajuan yang kecil. Tetapi sebagaimana halnya gambaran di Indonesia (*lihat Kotak 6*), masih tersisa pertanyaan-pertanyaan besar. Akankah kemajuan di tingkat dunia dijabarkan ke tingkat nasional atau daerah? Bagaimana dengan kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan, tetapi yang memiliki daya ikat longgar, misalnya kelompok perempuan? Apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan ruang politik yang semakin berkembang ini?

► PEMANTAUAN DAN TELEKOMUNIKASI DUNIA: ALAT YANG NYAMAN, TETAPI MEMBERDAYAKAN?

Tahun 2010 menunjukkan kemajuan besar dalam teknologi pemetaan dan pemantauan hutan dunia. Google menerbitkan Sistem Earth Engine⁵⁸ dan Cisco bersamaan dengan NASA meluncurkan Sistem Otomatis Penilaian, Pelaporan, dan Pelacakan Perubahan Lahan (*Automated Land-change Evaluation, Reporting and Tracking System/ALERTS*),⁵⁹ dasar penghitungan yang akan memungkinkan pengukuran dan pelacakan penggunaan lahan dan karbon hutan yang jauh lebih tepat oleh masyarakat internasional. Untuk lebih berpotensi memberdayakan masyarakat setempat, juga diluncurkan O3b Networks pada tahun 2010 — yang diumumkannya gugusan satelit pada tahun 2012 akan menyediakan peluang untuk akses internet pita lebar ke ‘tiga miliar lainnya’ (yakni ‘O3b’), yaitu masyarakat yang sejauh ini telah ditolak aksesnya ke internet karena “alasan letak daerah, ketidakstabilan politik, dan ekonomi.”⁶¹ Kekuatan teknologi informasi dan komunikasi seluler ditunjukkan ketika Pemerintah Mozambik mengumumkan kenaikan harga pangan dan listrik pada bulan September. Pengumuman itu menyulut kerusuhan di jalan-jalan Maputo, yang diatur melalui telepon seluler dan pesan teks — yang menyebabkan seketika ditunda oleh pemerintah.⁶²

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengaitkan penyebaran telekomunikasi dan akses internet tersebut dengan perniagaan, perdagangan, dan pendidikan, maupun dengan kemajuan yang lebih cepat untuk mencapai MDGs.⁶³ Pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi perubahan iklim disebutkan dalam kesepakatan Cancun⁶⁴ maupun dalam Kesepakatan Rakyat (*Peoples Agreement*), yang dihapus pada Konferensi Rakyat Dunia tentang Perubahan Iklim dan Hak Ibu Pertiwi 2010 (*2010 World People’s Conference on Climate Change and Rights of Mother Earth*).⁶⁵ Masyarakat dan perempuan Kenya juga bersatu-padu mendorong kesetaraan yang memicu undang-undang dasar nasional yang baru, sebagaimana dapat dilihat pada *Kotak 2*.

Jumlah pengguna internet melonjak dari 5% penduduk dunia pada tahun 2000 menjadi 29% pada tahun 2010, dengan kenaikan hampir 2.500% di Afrika dalam dasawarsa terakhir.⁶⁶ Akses pita lebar di daerah terpencil akan memungkinkan berbagi multimedia (termasuk peta) secara mudah, lebih memudahkan kemampuan dan pertanggungjawaban pemetaan daerah setempat, dan memungkinkan masyarakat

“Sebagai perempuan Masyarakat Adat, radio komunitas merupakan satu-satunya tempat saya dapat mengungkapkan pandangan dan pendapat saya dan yakin bahwa hal itu akan didengar oleh seisi kota. Walikota mengungkapkan pendapatnya di radio kami; demikian juga polisi dan saya.”⁶⁰

Angelica Cubur Sul, Manajer,
Radio Ixchel

dan para pembelanya mendorong perubahan dengan lebih cepat. Kemajuan pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan luar biasa atas kemampuan teknologi untuk memberdayakan masyarakat miskin dan yang tidak diberi hak kelola, dan mempertahankan agar pemerintah dan para pejabat bertanggung jawab. Akan tetapi, radio setempat masih merupakan hal terpenting di kebanyakan daerah perdesaan di dunia, dan sebagian pemerintah masih mengendalikan media dasar ini. Di Guatemala, 175 kelompok masyarakat setempat mencoba mengatasi larangan pemerintah terhadap radio komunitas.⁶⁷ Apabila pemerintah membatasi radio, akankah mereka membatasi akses internet pita lebar? Akankah masyarakat memiliki akses yang sama untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mempengaruhi interpretasi teknologi pemetaan dan pemantauan baru tersebut – yang akan memantau hutan mereka?

“Gerakan lingkungan India modern harus bersikap rendah hati. Ini merupakan kegiatan aktivis dari kalangan masyarakat yang sama, yang kami –pegiat lingkungan dari kelas menengah– sulit mempercayai bahwa mereka telah mengalahkan salah sebuah perusahaan terkuat di dunia, Vedanta. Ini merupakan gerakan lingkungan untuk masyarakat yang sangat miskin. Kegiatan mereka digerakkan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup... Untuk lebih jelasnya, ini bukan gerakan lobi hijau yang lahir dari kota. Ini gerakan sebuah suku... Ini keyakinan mereka terhadap budaya yang membuat mereka berjuang.”

Sunita Narain, pegiat lingkungan hidup India, dalam keputusan Agustus 2010 untuk menghentikan tambang bauksit Vedanta Resources di Orissa

► PELESTARIAN BESAR-BESARAN KEMBALI: TETAPI MASYARAKAT SETEMPAT MENENTANG KARENA INGIN MEMEGANG KENDALI

Meskipun pembelajaran kurang runtut tentang keberhasilan maupun dampak perlindungan hutan secara biasa terhadap hak asasi manusia, pelestarian besar-besaran dipercaya akan kembali pada tahun 2011.⁶⁸ Pada bulan Oktober, Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) dalam COP-10 bersepakat untuk memperluas wilayah daratan yang dilindungi sebesar 70% dari 12 hingga 17% luas lahan di bumi, walaupun dengan “keikutsertaan aktif Masyarakat Adat.”⁶⁹ Selain itu, lembaga-lembaga (LSM) pelestarian internasional terbesar, sedang melakukan perombakan dan mengatur posisi untuk menanggapi peluang dan tantangan baru dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan meningkatkan peran penting sebagai penasihat bagi instansi lingkungan hidup pemerintah di negara-negara yang dipercaya untuk melaksanakan REDD.⁷⁰ Peran yang diperluas ini melengkapi berkembangnya kemitraan mereka dengan perusahaan-perusahaan besar, yang berharap dapat menjalankan bisnis ‘hijau’ sambil membantu LSM tersebut untuk mempertahankan kelayakan model pelestarian mereka dalam jangka lebih

panjang.

Di bawah tekanan yang meningkat, yang bermula dari penyalahgunaan hak asasi manusia pada masa lalu, tujuh LSM internasional terbesar, dengan bantuan dari Serikat Internasional untuk Pelestarian Alam (*International Union for Conservation of Nature/IUCN*) dan Lembaga Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan (*International Institute for Environment and Development/ IIED*),⁷¹ secara resmi mengumumkan prakarsa untuk

menanggapi kecaman yang meluas atas tindakan mereka yang disebut dengan Prakarsa Pelestarian Berlandaskan Hak Asasi Manusia (*Conservation Initiative on Human Rights/ CIHR*) dan berjanji untuk lebih menghargai hak asasi manusia dan penghidupan masyarakat setempat dalam kebijakan dan praktik mereka. Walaupun pernyataan misi baru mencakup ‘hak asasi manusia dan kesejahteraan,’ hanya ada sedikit bukti mengenai

komitmen nyata untuk mengubah cara-cara yang dilarang pada masa lalu. Walaupun demikian, LSM-LSM ini masih menanggapi tuduhan yang berdasarkan kenyataan seperti temuan dan rekomendasi tahun 2009 dari Pelapor Khusus UNHCR tentang Masyarakat Adat (*UNHCR Special Rapporteur on Indigenous Peoples*) yang menegaskan bahwa kawasan lindung dan hukum nasional seharusnya direvisi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia sekarang ini dalam kaitannya dengan pelestarian di Nepal.⁷² Sementara itu, penduduk setempat di beragam bentang darat hutan meningkatkan tekanan untuk memperoleh tanggapan lebih cepat.

Kegiatan aktivis masyarakat akar rumput oleh FECOFUN, perhimpunan kelompok pengguna kehutanan masyarakat nasional Nepal, beserta LSM-LSM pendukungnya, menyebabkan negara tersebut menolak pelestarian model lama. FECOFUN menggerakkan unjuk rasa dan protes pada bulan-bulan awal tahun 2010 yang melibatkan para pemimpin terpilih setempat, kelompok pengguna kehutanan masyarakat, dan masyarakat setempat lain yang terkena dampak. Dalam hal wilayah pelestarian yang diusulkan, yaitu Gaurishankar di Distrik Dolakha, rencana acara pembukaan oleh Perdana Menteri pada bulan Maret 2010 berhasil dihentikan oleh FECOFUN dan pihak-pihak lainnya. Walaupun proses musyawarah dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan, hak masyarakat setempat belum dituntaskan. Sebagai akibat dari tindakan FECOFUN, Pemerintah Nepal membatalkan usulan tersebut dan mempertimbangkan kembali bagaimana cara menghargai hak masyarakat.

Lembaga-lembaga masyarakat tingkat bawah dan para mitranya sering melakukan perlawanan yang tidak terlihat yang terus-menerus berjuang untuk pelestarian yang berkeadilan sosial selama tiga puluh tahun terakhir ini. Hasil kerja mereka besar.

Masyarakat tingkat bawah dan para mitranya sering melakukan perlawanan yang tidak terlihat yang terus-menerus berjuang untuk pelestarian yang berkeadilan sosial selama tiga puluh tahun terakhir ini.

Gerakan sosial Transamazon baru-baru ini berhasil melakukan pembelaan terhadap ditetapkannya 5,6 juta hektar berbagai cagar alam di lembah Sungai Xingu di Amazon,⁷³ dan gerakan Masyarakat Adat berhasil memperoleh kendali atas lebih dari 1 juta km² hutan sedangkan keluarga penyadap karet berhasil memperoleh kendali atas cagar alam seluas seluruhnya 200.000 km². Transamazon yang merupakan contoh yang berlainan cara dengan LSM internasional bagaimana dapat mencapai sasaran pelestarian melalui kemitraan dengan gerakan sosial dan mengakui mereka sebagai lembaga mitra luar-daerah. Tahun 2010 menunjukkan bahwa penolakan oleh masyarakat -seiring dengan waktu- akan mengubah arah pelestarian. Dan bersama CIHR, LSM internasional besar mulai mengakui perlunya pertanggungjawaban kepada masyarakat.

► BRIC DATANG: PENATAAN ULANG DUNIA DAN TANTANGAN BARU BAGI PEMBANGUNAN

Telah diketahui bahwa selama beberapa waktu, BRIC – Brazil, Rusia, India, dan Cina – dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya telah tumbuh jauh lebih cepat daripada kelompok negara yang dulu disebut G7,⁷⁴ dan bahwa kekuatan ekonomi ini pada akhirnya akan berwujud menjadi kekuatan politik. Akan tetapi, banyak orang tidak menduga bahwa pergeseran terjadi begitu cepat.

Pergeseran kekuatan ekonomi ini mengubah tatanan politik dan kelembagaan dunia.

Dalam 40 tahun kemudian, ekonomi Brazil, Rusia, India, Cina, dan Meksiko diperkirakan tumbuh rata-rata 6,1% tiap tahun, memperbesar porsi produk domestik bruto (PDB) mereka di kalangan kelompok negara G20⁷⁵ dari 18,7% pada tahun 2009 menjadi 49,2% pada

tahun 2050. Sebaliknya, PDB negara-negara G7 diperkirakan tumbuh rata-rata kurang dari 2,1% tiap tahun sampai dengan tahun 2050, dengan porsi PDB dalam G20 menurun tajam dari 72,3% pada tahun 2009 menjadi 40,1% pada tahun 2050. Dalam hal paritas (kesetaraan) daya beli, pergeseran bahkan lebih besar.⁷⁶

Pergeseran dalam kekuatan ekonomi ini mengubah tatanan politik dan kelembagaan dunia. Keseimbangan kekuatan suara di PBB dan lembaga keuangan multilateral bergeser ke negara-negara dengan ekonomi yang mulai kuat. Cina memperoleh manfaat terbesar. Sebagai contoh, porsi suara di Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) naik menjadi 4,42% sehingga menjadikannya pemegang saham terbesar ketiga di bank tersebut. Cina juga ditetapkan memperoleh porsi suara terbesar ketiga di Dana Moneter Internasional (IMF). Berdasarkan perubahan yang disepakati pada November 2010, negara-negara dengan ekonomi maju akan mengalihkan lebih dari 6% saham IMF kepada negara-negara dengan ekonomi yang mulai kuat, termasuk Cina, yang kekuatan suaranya

akan terdongkrak di atas Jerman, Inggris, dan Perancis.

Apakah berhubungan dengan krisis keuangan dan ekonomi, perdagangan dunia atau kesepakatan tentang iklim, negara-negara dengan ekonomi yang mulai kuat semakin menentukan nasib dunia. Mereka tidak hanya meningkatkan pengaruh pada lembaga keuangan multilateral, tetapi juga secara terpisah berinvestasi dan menyediakan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang.⁷⁷

Investasi dan bantuan dari negara-negara dengan ekonomi yang mulai kuat tersebut sering memperoleh penghargaan yang tidak sepadan dengan besarnya karena diberikan dengan cukup cepat dan mudah – tanpa syarat politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, pengamanan (kemajuan yang menjadi pencapaian utama masyarakat pembangunan dunia dalam empat dasawarsa terakhir), ataupun prosedur birokrasi yang biasanya dikenakan kepada donor bilateral tradisional ataupun lembaga keuangan multilateral. Mungkin yang lebih penting daripada besarnya investasi ialah dirasakannya kekuatan politik ‘Timur’ yang membesar terhadap ‘Barat’: para pemimpin negara yang sedang berkembang semakin menolak pembangunan dan demokrasi berdasarkan model konvensional dari Utara dan sebagai gantinya beralih terilhami oleh Beijing. Selanjutnya, negara-negara yang paling cepat tumbuh di Afrika – Ethiopia, Rwanda, dan Uganda – dipimpin oleh para pemimpin politik dengan dedikasi terbatas, dan tampaknya sedang mengalami kemunduran, terhadap demokrasi terbuka dan pemilihan umum sehingga kurang toleran terhadap syarat dan pengamanan yang dikenakan dalam bantuan pembangunan dari Utara.

Mungkin yang lebih penting daripada besarnya investasi ialah dirasakannya kekuatan politik ‘Timur’ yang membesar terhadap ‘Barat’.

Di sisi lain, ada tanda-tanda harapan di dunia yang sedang menata ulang dirinya secara cepat ini. Pertama, perluasan ekonomi banyak negara yang sedang berkembang mendorong pertumbuhan pasar dalam negeri mereka secara cepat, menciptakan peluang bagi beragam usaha kecil dan menengah, baik di negaranya masing-masing maupun di luar negeri – yang berpotensi besar untuk mengurangi kemiskinan. Kedua, meningkatnya penyatuan negara-negara ini dengan negara-negara lain meningkatkan harapan dan kemungkinan penolakan oleh masyarakat mereka sendiri, yang menuntut keterbukaan pemerintah lebih besar, suara yang lebih besar dalam urusan ekonomi dan politik, dan pengembangan standar lingkungan dan sosial nasional. Bagaimana negara-negara ini, dan investor-investor mereka dari luar negeri, akan menanggapi penolakan masyarakat pada tahun 2011? ■

MENENGGOK KE DEPAN KE TAHUN 2011: PERSOALAN LAMA, PELUANG BARU

Dengan hak dan tenurial lahan dalam agenda, masyarakat dan masyarakat sipil semakin memiliki tempat dalam perundingan, dan pasar yang berkembang bagi produksi dan usaha lokal, tahun 2011 akan membawa peluang yang lebih besar daripada sebelumnya untuk memajukan hak dan penghidupan masyarakat maupun perubahan pada sektor kehutanan. Yang belum jelas ialah apakah perubahan ini akan didukung oleh pemerintah, lembaga pelestarian, dan investor swasta, atau apakah pelestarian konvensional, industri pembalakan, dan “bisnis seperti biasa” akan berlaku. Tanpa kerangka kerja dan pengamanan yang mantap di tingkat global untuk mengendalikan dan mengelola kebijakan dan investasi internasional, arah perubahan akan semakin diatur di tingkat nasional. Tanpa investor, wirausaha, dan agen pembangunan pembaharu yang membuka kemungkinan untuk bermitra dengan dan mendukung masyarakat dan usaha setempat, peluang-peluang baru ini tidak akan dimanfaatkan.

Tentu saja, akan memberi hasil di beberapa negara dan kemunduran di negara lainnya. Di beberapa negara, Masyarakat Adat, lembaga masyarakat, dan masyarakat sipil cukup mantap dan cukup maju landasan hukumnya untuk mengelola. Di negara lainnya, bantuan pembangunan resmi (ODA) dan kerangka kerja dunia, serta investor sektor swasta yang telah berjanji untuk memperbaharui CSR, akan melanjutkan peran pentingnya.

Bagaimana dunia menjawab enam pertanyaan akan menentukan apakah peluang baru untuk memajukan hak masyarakat dan penghidupan maupun perubahan pada sektor kehutanan akan dimanfaatkan ataukah hilang.

Akankah kerawanan pangan dan bencana iklim menggagalkan pembangunan dan hak?

Perasaan yang sama rentannya dengan politik ialah kelaparan, dan ketakutan akan kekurangan pangan dapat mengesampingkan seluruh janji politik dan moral lainnya. Tahun 2011 berpeluang menghasilkan lebih banyak janji tersebut. Negara donor yang berhubungan dengan keadaan darurat dan pemerintah yang menghadapi kekurangan pangan kemungkinan akan mengambil jalur politik yang bijak dan mengalihkan sumberdaya dan perhatian dari investasi jangka panjang dan reformasi pembangunan untuk mengurus keadaan darurat.

Negara kaya pengimpor bahan pangan akan terus melindungi lebih banyak lahan di negara yang sedang berkembang, karena pemerintah miskin sering bersedia mengorbankan hak atas lahan perdesaan. Bahkan yang lebih bermasalah – akan ada peningkatan peluang dan alasan untuk memusatkan kembali kewenangan guna menangani keadaan darurat nasional dan mengesampingkan hak masyarakat setempat atas nama kepentingan nasional yang mendesak. Produsen dan masyarakat setempat yang kuat dan berdaya itu penting untuk menaikkan produksi pangan dan meningkatkan ketahanan terhadap iklim. Dalam menghadapi tuntutan persaingan untuk ODA dan mendesaknyanya keamanan nasional, akankah pemerintah mempertahankan janji mereka tentang hak dan proses yang semestinya? Akankah mereka memilih untuk memberdayakan masyarakat setempat?

Akankah ODA bilateral untuk perubahan iklim menerapkan pengamanan dan pertanggungjawaban?

Bantuan pembangunan multilateral, seperti yang diberikan melalui Bank Dunia atau PBB, semakin dipengaruhi dan kadang-kadang bahkan dikelola bersama oleh perwakilan masyarakat sipil, Masyarakat Adat, dan masyarakat setempat. Lembaga yang sama ini semakin memiliki standar sosial dan lingkungan dan mekanisme bantuan yang memungkinkan masyarakat setempat mempertahankan agar mereka tetap bertanggung jawab. Walaupun sebagian besar pendanaan baru untuk perubahan iklim disalurkan melalui donor bilateral –yang seperti biasanya tidak memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberi masukan dan pengamanan ataupun keluhan bagi investasi mereka sendiri. Kelemahan ini menjadi membahayakan tatkala donor semakin didorong untuk menunjukkan dampak cepat, negara dapat mengajukan permintaan bantuan kepada donor yang memberi syarat termudah, dan donor baru dari kalangan negara-negara dengan ekonomi yang mulai kuat bahkan hanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemerintah negara penerima. Pemberian dana bantuan bilateral juga tidak terelakkan dipengaruhi oleh kepentingan politik dan keamanan dalam negeri, yang meningkatkan kemungkinan ditanggalkan atau dikorbankannya standar sosial demi tujuan politik yang lebih besar. Pada tahun 2010, ada perjuangan diantara para peserta Kemitraan REDD+ tentang apakah mereka perlu menerapkan pengamanan. Kemitraan tersebut akan memenuhi dan menggulirkan program dan prosedurnya pada tahun 2011. Akankah pemerintah menerapkan standar dan mekanisme pertanggungjawaban bagi investasi mereka sendiri?

Akankah standar dan pertanggungjawaban nasional diperkuat untuk memberi sanksi kepada investasi swasta, REDD, dan LSM besar internasional?

Sementara ODA akan tetap penting di beberapa negara, sebagian besar investasi di kawasan hutan akan terus datang dari sektor swasta dan LSM besar pelestarian internasional. Investasi ini biasanya dikondisikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, yang biasanya tanpa persetujuan tidak terikat yang diberitahukan sebelumnya dari masyarakat setempat dan kurang terbuka. Di sebagian besar kawasan hutan di negara yang sedang berkembang, mekanisme peradilan dan pertanggungjawaban maupun proses musyawarah dengan masyarakat yang lemah, landasan peraturan yang rumit, dan tantangan besar bagi perempuan untuk menjalankan haknya juga lebih berupa aturan daripada penyimpangannya. Banyak sistem sertifikasi hutan sukarela internasional telah dibuat untuk membantu mengisi kekosongan ini, tetapi semuanya dibatasi untuk investasi, wilayah, dan produk tertentu. Pada akhirnya, tidak ada pengganti bagi standar, musyawarah dengan masyarakat, dan pertanggung-jawaban tingkat nasional. Dengan harapan berkembangnya semua jenis investasi dan meningkatnya kewenangan dan kemampuan lembaga-lembaga kehutanan, ada peluang besar untuk mengatur atau memperkuat sistem pengamanan – yang membawa kejelasan, kesederhanaan, dan keamanan, baik bagi masyarakat setempat, pemerintah, maupun investor. Pada tahun 2011, akankah pemerintah nasional, donor, dan sektor swasta menangkap peluang yang disediakan oleh dana perubahan iklim dan mendorong standar, sistem pemenuhan dan pertanggungjawaban yang baru?

Akankah Indonesia dan Republik Demokratik Kongo patuh untuk memperbarui tenurial lahan?

Dalam hal jumlah masyarakat hutan, emisi gas rumah kaca akibat penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, dan kawasan hutan tropis yang terancam, dua negara ini penting bagi dunia. Pada tahun 2010, pemerintah kedua negara memberi tanda-tanda keterbukaan baru untuk mengakui hak masyarakat setempat dan mempertimbangkan pembaharuan tenurial lahan. Keduanya juga menempatkan diri untuk menjamin dana kesiapan REDD yang besar dan menarik dana-dana lain melalui pasar swasta, dan keduanya telah diberi tahu oleh masyarakat internasional dan warga negara masing-masing bahwa REDD tidak dapat berjalan dan tidak dapat berhasil jika hak masyarakat setempat tidak diakui. Di sisi lain, kedua negara tersebut memiliki warisan masa penjajahan dalam hal penyalahgunaan sumberdaya dan kepentingan yang kuat dalam bidang industri pembalakan, industri minyak sawit, dan sektor pertanian. Keduanya dipengaruhi dengan gencar untuk menyisihkan lebih banyak hutan bagi kawasan lindung untuk umum. Keduanya menjadi tuan rumah konferensi besar tentang hutan dan tata kelola pada tahun 2011 dan akan memiliki

banyak peluang untuk memberi janji kepada masyarakat tentang pengakuan hak adat dan memulai proses panjang pembaharuan tenurial lahan. Warga negara kedua negara tersebut dan dunia akan mengawasinya.

Akankah REDD ditata ulang untuk mendukung pelestarian oleh masyarakat dan menangani adaptasi dan pertanian?

REDD dirancang untuk mengurangi deforestasi dan ditujukan terutama untuk membangun prasarana kelembagaan bagi pasar penggantian karbon. Bank Dunia, REDD-PBB, dan Kemitraan REDD+ semuanya akan menjalankan program mereka pada tahun 2011. Dengan pasar karbon dunia yang merupakan kenyataan yang masih jauh dan proyek sukarela swasta yang kecil dan tersebar, ODA tidak diragukan lagi akan tetap menjadi sumber keuangan dan dana nasional terbesar –yang menjadi wahana utama untuk imbalan. Mungkin yang lebih penting ialah: hanya tiga sampai lima negara memiliki peluang nyata untuk mengambil manfaat dari pasar mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim itu kenyataan yang jauh lebih mendesak di kebanyakan negara penerima bantuan REDD. Terdapat bukti lain pada tahun 2010 bahwa investasi dalam pelestarian dan pemulihan oleh masyarakat dapat membantu mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mengurangi kemiskinan. Menjadi semakin jelas bahwa, dengan kehendak politik yang memadai, penyebab paling merusak dari deforestasi – pembukaan lahan untuk pertanian industri dan pembalakan – dapat dijegal. Akankah ODA menjamin bahwa REDD mendukung harapan masyarakat setempat atas industri dan melengkapi tujuan jangka panjang untuk menghapus kemiskinan di perdesaan, beradaptasi terhadap perubahan iklim, dan pemulihan lingkungan di wilayah perdesaan yang lebih luas?

Siapa yang akan dipilih oleh masyarakat hutan dan Masyarakat Adat sebagai mitra?

Selama kira-kira satu dasawarsa terakhir, kerjasama telah berkembang – yang menciptakan lebih banyak kenyamanan dibandingkan ikatan batin – antara lembaga lingkungan dan Masyarakat Adat maupun masyarakat hutan. LSM besar lingkungan internasional yang kaya telah mendekati Masyarakat Adat dan memulai program-program baru untuk mendukung kehutanan masyarakat dan pelestarian. Ketika Masyarakat Adat dan lembaga masyarakat telah menguat, melakukan penolakan, dan memperoleh kursi dalam perundingan, mereka tidak lagi menjadi mitra bimbangannya dan semakin mengungkapkan suara dan rencana mandiri mereka. Mereka sering memiliki pandangan tentang pelestarian yang berbeda dengan LSM besar lingkungan internasional dan, tentu saja, pada hakikatnya berpedoman pada

upaya untuk melindungi hak dan penghidupan mereka sendiri. Keretakan yang timbul menjadi lebih lebar di Cancún, ketika beberapa kelompok Masyarakat Adat menyanggah kesepakatan REDD yang justru dari situlah mereka akan mendapatkan manfaat sedangkan beberapa lembaga lingkungan hidup mencela REDD, yang mengkhawatirkan bahwa hal tersebut menjadi alasan lain bagi Utara untuk tidak mengurangi emisi dan mengendalikan pembangunan mereka yang boros karbon. Perbedaan ini kemungkinan akan membesar. Lalu, siapa yang akan bermitra dengan masyarakat hutan dan Masyarakat Adat pada masa mendatang dalam upaya mereka agar pilihan hak dan penghidupan mereka dihargai? Akankah lembaga pelestarian menyesuaikan diri dan mendukung pendekatan berlandaskan hak dan suara masyarakat setempat? Yang terpenting ialah siapa yang akan dipilih oleh masyarakat hutan dan Masyarakat Adat sebagai mitra mereka pada masa mendatang? ■

CATATAN AKHIR

- 1 Mines and Communities (MAC). 2010. <http://www.minesandcommunities.org>
- 2 Survival International. 2010. "David v. Goliath: Indian tribe in 'stunning' victory over mining giant." 24 Agustus 2010. <http://www.survivalinternational.org/news/6385>
- 3 Narain, Sunita. 2010. "Vedanta and lessons in conservation." Down to Earth Science and Environment Online. 15 September 2010. <http://www.downtoearth.org.in/node/1843>
- 4 Rights and Resources Initiative. 2010. Pembaruan Email RRI. Triwulan 3 Tahun 2010. Washington, D.C.: RRI. http://www.rightsandresources.org/quarterly_updates.php
- 5 Perlawanan di Nepal menunjukkan kejadian lebih besar yang melelahkan di seluruh dunia dimana Masyarakat Adat dan masyarakat setempat sedang berjuang keras untuk melindungi hak mereka. Pada bulan Juni, Pemerintah Papua Nugini mengubah Undang-Undang Lingkungan untuk memperbesar kewenangan Kementerian Lingkungan dalam memberikan izin untuk proyek-proyek pemanfaatan sumberdaya, memberikan hak kepada pengembang sektor swasta. Di Laos, permintaan internasional akan lahan produktif memacu pembuatan undang-undang yang memberikan hak kepada pembeli asing untuk membeli lahan permukiman di daerah yang berpenduduk sedikit tanpa mepedulikan dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan pada terambilnya lahan Masyarakat Adat dan setempat. Di Bolivia, perluasan Taman Nasional Noel Kempff sebagai bagian proyek REDD+ yang diprakarsai oleh LSM internasional telah menyebabkan kegemparan setempat walaupun LSM mengaku bahwa hak penghuni hutan tidak dirugikan.
- 6 FECOFUN. 2010. Pernyataan Pers "Untuk Mengurangi Hak Kelompok Pengguna Kehutanan masyarakat". Siaran pers tertanggal 3 Oktober 2010.
- 7 UNFCCC. 2010. Outcome of the Work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention. http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf
- 8 Dewan, Angela. 2010. "Leaders Push for REDD+ as Countdown Begins." CIFOR. 6 Desember 2010. <http://ciforblog.wordpress.com/2010/12/06/leaders-push-for-redd-as-countdown-begins/>. Stern (2006) juga menyimpulkan bahwa "memperjelas hak milik atas lahan hutan maupun hak dan tanggung jawab hukum pemilik lahan merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan kebijakan dan penegakan hukum". Stern, Nicholas. 2006. *The Economics of Climate Change: Stern Review*. London: Cabinet Office, Her Majesty's Treasury. 541.
- 9 UNFCCC. 2010. Outcome of the Work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention. http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf
- 10 Rights and Resources Initiative. 2011. Forthcoming report on drivers of deforestation. Washington, D.C.: Rights and Resources Initiative. <http://www.rightsandresources.org>
- 11 Sunderlin dkk. 2008. *From Exclusion to Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Tenure Reform*. Washington, D.C.: Rights and Resources Initiative. http://www.rightsandresources.org/publication_details.php?publicationID=736
- 12 World Bank. 2010. *Rising Global Interest In Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington, D.C.
- 13 Kenya Law Reports. 2010. "The Constitution of Kenya."
- 14 The International Women's Human Rights Clinic, Georgetown University Law Center. 2010. "Women's Land and Property Rights in Kenya – Moving Forward into a New Era of Equality: A Human Rights Report and Proposed Legislation." *Georgetown Journal of International Law*, The Summit: Issue 1.
- 15 IRIN. 2010. "CONGO: New law to protect rights of indigenous peoples." <http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=91564>

- 16 Sunderlin dkk. 2008; Rights and Resources Initiative & International Tropical Timber Organization. 2009. *Tropical Forest Tenure Assessment: Trends, Challenges and Opportunities*. Yokohama, Japan dan Washington, D.C.: ITTO/RRI. Gambar 1 dan 2 berisi data dari negara berikut: Afrika — Republik Demokratik Kongo, Sudan, Angola, Zambia, Tanzania, Republik Afrika Tengah, Kongo, Gabon, Kamerun, Chad, Nigeria, Pantai Gading, Niger, dan Togo (73% dari hutan Afrika). Asia — Australia, Indonesia, India, Myanmar, Papua Nugini, Jepang, Thailand, dan Kamboja (80% dari hutan Asia). Amerika Latin — Bolivia, Brazil, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ekuador, dan Honduras (74% dari hutan Amerika Latin). Kawasan lain — Rusia, Kanada, AS, Swedia, Jepang, Finlandia. State Forestry Administration. 2007. *China Forestry Yearbook*. Beijing: China Forestry Publishing House.
- 17 Penindasan yang telah berjalan lama ini berlanjut dalam pengaturan yang terkait dengan iklim. Dalam survei rencana aksi nasional mengenai adaptasi perubahan iklim, ditemukan bahwa sepertiganya tidak menyebutkan perempuan atau jender dan sepertiganya melakukan demikian hanya secara formalitas. Bahkan sepertiga lainnya dari rencana aksi nasional yang memiliki pendekatan bagus dalam hal jender, kebanyakan tidak mencakup perempuan dalam perencanaannya.
- 18 Davis dkk. 2010. *Getting Ready with Forest Governance: A Review of the World Bank Forest Carbon Partnership Facility Readiness Preparation Proposals, v 1.4* WRI Working Paper. Washington, D.C.: World Resources Institute. <http://www.wri.org/gfi>
- 19 Rights and Resources Initiative. *Community Forest Tenure: Measuring the Distribution of the Bundle of Rights*. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. Laporan yang tidak dipublikasikan yang disusun oleh Fernanda Almeida. Survei mencakup 13 negara tropis, Australia, dan Cina.
- 20 Business & Human Rights Resource Centre. 2010. Mandé Norte/Muriindó Project, Colombia – 2009. <http://www.business-humanrights.org/Documents/MandeNorte>
- 21 Tribunal Permanente de los Pueblos (Mahkamah Rakyat Tetap). 2008. *Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia* (Perusahaan Transnasional dan Hak-hak Masyarakat di Kolombia), 2006-2008 Sesión Final (Tahap Akhir). <http://www.sicsal.net/articulos/node/631>
- 22 The Economist. 2010. "Facing the Consequences." 25 November 2010. <http://www.economist.com/node/17572735>
- 23 International Energy Agency. 2010. *World Energy Outlook 2010*. Paris: International Energy Agency. 736 hlm. <http://www.worldenergyoutlook.org/>
- 24 GRAIN. 2010. "Saudi investors poised to take control of rice production in Senegal and Mali?". 29 November 2010. <http://www.grain.org/articles/?id=75>
- 25 Nowligbèto, Fernand. 2010. "Afrique, la ruée vers les terres: une bombe à retardement." (Afrika, perebutan lahan: bom waktu). *La Nouvelle Tribune*. 9 November 2010. <http://farmlandgrab.org/17012>
- 26 Radio Canada. 2010. "La ruée vers les terres." (Perebutan lahan). Video. 12 March 2010. http://www.radio-canada.ca/emissions/une_heure_sur_terre/2009-2010/Reportage.asp?idDoc=106044
- 27 MacFarquhar, Neil. 2010. "African Farmers Displaced as Investors Move In." *New York Times*. 21 Desember 2010. <http://www.nytimes.com/2010/12/22/world/africa/22mali.html>
- 28 Parry, Martin dkk. 2009. *Climate Change and Hunger: Responding to the Challenge*. Rome, Italy: World Food Programme. 6. <http://www.wfp.org/content/climate-change-and-hunger-responding-challenge>
- 29 Harmeling, S., Bals, C., Sterk, W. & R. Watanabe. 2009. *Funding Sources for International Climate Policy: A Criteria-Based Analysis of the Options Discussed under the UNFCCC*. Briefing Paper. Germanwatch & Wuppertal Institute: Bonn. <http://www.germanwatch.org/klima/funds09e.pdf>
- 30 The Economist. 2010. *The year in nine pictures*. Gambar semula diterbitkan dalam edisi the Economist dalam-jaringan pada tanggal 29 Desember 2010. http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/12/charts_2010

- 31 FAO. 2010. *Food Outlook: Global Market Analysis, November 2010*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- 32 United States Department of Agriculture. 2010. *U.S. Farm Sector Overview*. Diperbarui 7 Desember 2010. <http://ers.usda.gov/publications/outlook/moreoverview.htm>
- 33 Mundy, Simon. 2010. "Seven die in Mozambique food rioting." *Financial Times*. 2 September 2010. <http://www.ft.com/cms/s/0/90cf28b2-b6c8-11df-b3dd-00144feabdc0.html#axzz1AHYt6QSR>
- 34 cf. World Bank. 2010. *Rising Global Interest In Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington, D.C.
- 35 Koh, Lian Pin dan David Wilcove. 2008. "Is oil palm agriculture destroying tropical biodiversity?" *Conservation Letters* 1: 60-64.
- 36 Lang, Chris. 2010. "World Bank's FCPF in Indonesia fails to address civil society concerns." REDD-Monitor. 25 Mei 2010. <http://www.redd-monitor.org/2010/05/25/world-banks-fcpf-in-indonesia-fails-to-address-civil-society-concerns/>
- 37 Colchester, Marcus. 2011. *Palm Oil and Indigenous Peoples in South East Asia: Land Acquisition, Human Rights Violations and Indigenous Peoples on the Palm Oil Frontier*. Moreton-in-Marsh, Inggris dan Roma, Italia: Forest Peoples Programme/International Land Coalition.
- 38 Sekitar 40% industri, termasuk kelengkapan produksi, bank, pengecer, dan perusahaan perdagangan kelapa sawit terbesar di dunia, Wilmar Group, mengaku merupakan anggota RSPO, demikian pula beberapa LSM. Dalam pengamatan LSM, RSPO membutuhkan audit independen oleh badan sertifikasi yang diakui sesuai dengan norma hak asasi manusia internasional. RSPO menyediakan bimbingan kepada perusahaan mengenai cara untuk menghormati asas persetujuan cuma-cuma yang diberitahukan sebelumnya dalam mengembangkan perkebunan dan pabrik dan telah membuat sarana penyelesaian perselisihan yang sangat populer.
- 39 Li, Ping dan Robin Nielsen. 2010. *A Case Study on Large-Scale Forestland Acquisition in China: The Stora Enso Plantation Project in Hepu County, Guangxi Province*. Washington, DC: Rights and Resources Initiative/Rural Development Institute.
- 40 Butler, B.J and E.C. Leatherberry. 2004. America's Family Forest Owners. *Journal of American Forestry* 102(7):4-14.; FAO 2007 (Unasylva 228) Smith W.B., Miles P.D., Vissage, J.S., Pugh S.A. 2004. Forest Resources of the United States, 2002. St. Paul, MN: USDA For. Serv. N. Central Res. Stn. <http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/42019/1/IND44379448.pdf>
- 41 McKinsey Strategy Practices. 2010. *Global Forces: How Strategic Trends Affect your Business*. February 2010. McKinsey and Company. www.mckinsey.com/client/service/strategy/pdf/Strategic_Trends.pdf
- 42 Kugel, Seth. 2010. "Açaí, a Global Super Fruit, Is Dinner in the Amazon." *New York Times*. 23 Februari 2010. <http://www.nytimes.com/2010/02/24/dining/24acai.html>
- 43 Kugel, Seth. 2010. "Açaí, a Global Super Fruit, Is Dinner in the Amazon." *New York Times*. 23 Februari 2010. <http://www.nytimes.com/2010/02/24/dining/24acai.html>
- 44 Pemerintah Norwegia dan Indonesia. 2010. Surat Minat Kerjasama mengenai Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. 26 Mei 2010. http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/Letter_of_Intent_Norway_Indonesia_26_May_2010.pdf
- 45 Satriastanti, Fidelis. 2010. "Australia Boosts Support for REDD Scheme with \$45m." *The Jakarta Globe*. 10 December 2010. <http://www.thejakartaglobe.com/environment/australia-boosts-support-for-redd-scheme-with-45m/411091>
- 46 HuMa. 2010. *Preliminary Study on the Safeguards Policies of Bilateral Donors to REDD Programs in Indonesia*. Huma: Jakarta, Indonesia. June 2010.
- 47 World Bank. 2006. *Sustaining Indonesia's Forests: Strategy for the World Bank 2006-9*. World Bank:

- Washington DC. <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1152870963030/IDForestStrategy.pdf?resourceurlname=IDForestStrategy.pdf>
- 48 Hazely, C. 2000. *Forest-based and Related Industries of the European Union - Industrial Clusters and Agglomerations*. Helsinki, Finland: Research Institute of the Finnish Economy; National Alliance of Forest Owners. 2010. "Economic Impact of Private Forests Greater than Other Ownership types. The Forestry Source 15 (2). <http://nafoalliance.org/economic-impact-report>
- 49 Lang, Chris. 2010. "'We want to change this threat to an opportunity': Interview with Abdon Nababan and Mina Setra". REDD-Monitor. 4 July 2010. www.redd-monitor.org/2010/07/04/'we-want-to-change-this-threat-to-an-opportunity'-interview/
- 50 Gregersen dkk. 2010. *Does the Opportunity Cost Approach Indicate the Real Cost of REDD+? : Rights and Realities of Paying for REDD+*. Washington, D.C: Rights and Resources Initiative. <http://www.rightsandresources.org/publications.php>
- 51 Sebagai contoh, dalam pertemuan-pertemuan yang mengantar hingga COP-16, Masyarakat Adat memaparkan data mengenai keberlanjutan praktek pengelolaan tradisional dan bagaimana karbon hutan dapat dipantau dengan biaya rendah dengan menggunakan sistem pengetahuan budaya mereka. Praktek pengelolaan hutan berkelanjutan oleh masyarakat Meksiko telah meningkatkan mitigasi karbon sementara perusahaan-perusahaan memperbaiki penghidupan anggota masyarakat. Pada tanggal 24 November, Forum Masyarakat Adat Abya Yala bertemu di Cancún untuk menyusun saran bagi COP dan memilih seorang wakil untuk mengikuti Rapat Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim. Peserta menggarisbawahi peran sejarah dan terus-menerus yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dalam melestarikan hutan dan ekosistem melalui sistem sosial dan tata kelola yang rumit yang memudahkan pengawasan lingkungan yang kolektif, dan mempersyaratkan keikutsertaan Masyarakat Adat dalam perancangan dan pelaksanaan REDD+. Via Campesina, gerakan petani dunia untuk lahan dan hak, meminta kepada para pegiat untuk "keadilan iklim" pada tingkat masyarakat bawah di seluruh dunia untuk berbaris bersama ribuan orang di Cancún pada tanggal 7 Desember dan menggerakkan pertemuan-pertemuan LSM dengan masyarakat di 70 negara lain dalam minggu yang sama.
- 52 Gregersen, Hans dan Luke Bailey. 2011. Forthcoming. Rights and Resources Initiative.
- 53 Lee, Jesse. 2010. "President Obama signs the Claims Resolution Act of 2010." The White House Blog. 8 December 2010. <http://www.whitehouse.gov/blog/2010/12/08/president-obama-signs-claims-resolution-act-2010>
- 54 Associated Press. 2010. "No change in American Indian mascot names in Oregon." *Native American Times*. 3 Februari 2010. http://www.nativetimes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2996:no-change-in-american-indian-mascot-names-in-ore&catid=38&Itemid=13
- 55 Associated Press. 2010. "Elders working to save Kenai's first language." *Indian Country Today*. 12 Januari 2010. <http://www.indiancountrytoday.com/national/hawaiialaska/27913024.html>
- 56 Bureau of Indian Affairs. 2008. Jumlah surat permohonan menurut negara bagian sampai dengan 22 September 2008. <http://www.bia.gov/idc/groups/public/documents/text/idc-001212.pdf>
- 57 Obama, Barack. 2010. Keterangan Presiden pada Konferensi Masyarakat Adat di Gedung Putih. Disampaikan pada tanggal 16 Desember 2010. <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/12/16/remarks-president-white-house-tribal-nations-conference>
- 58 Mongabay.com. 2010. "Google lends its massive computing cloud in fight against deforestation." 3 Desember 2010. http://news.mongabay.com/2010/1203-google_earth_engine.html
- 69 The Economist. 2010. "Seeing the world for the trees." 18 Desember 2010. 153-4.
- 60 Camp, Mark. 2010. "Young, Aboriginal, Missing." Diisarkan melalui radio. Cultural Survival Quarterly 34

- (2). <http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/guatemala/air>
- 61 O3b Networks. 2010. <http://o3bnetworks.com/index.aspx>
- 62 Southwood, Russell. 2010. "SMS message ban raises difficulties." *Pambazuka News* 498. 29 September 2010. <http://www.pambazuka.org/en/category/coment/67340>
- 63 Ki-moon, Ban. 2010. Pesan Sekretaris Jenderal pada Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Dunia 17 Mei 2010. <http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=4544>
- 64 UNFCCC. 2010. Outcome of the Work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention. http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_1ca.pdf
- 65 Kesepakatan Masyarakat dari Konferensi Masyarakat Dunia mengenai Perubahan Iklim dan Hak Ibu Pertiwi. 22 April 2010, Cochabamba, Bolivia. <http://pwccc.wordpress.com/support>
- 66 Internet World Stats. 2010. "Internet Usage Statistics: The Internet Big Picture." <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>
- 67 Cultural Survival. 2010. "Guatemala Radio Project: The Guatemalan army couldn't wipe out Mayan culture, but American Idol can." <http://www.culturalsurvival.org/current-projects/guatemala-radio-project>
- 68 Alcorn, J.B. and A.G.Royo, 2007, Conservation's engagement with human rights: traction, slippage or avoidance, *Policy Matters* 15:115-139 ; laporan tahunan tujuh besar LSM pelestarian.
- 69 diatur pada CBD COP 2010.
- 70 cf., Alcorn, J.B. and A.G.Royo, 2007, Conservation's engagement with human rights: traction, slippage or avoidance, *Policy Matters* 15:115-139 ; laporan tahunan tujuh besar LSM pelestarian.
- 71 Pada tahun 2004, tujuh LSM konservasi (WWF, Conservation International, Flora and Fauna International, Wetlands International, The Nature Conservancy, BirdLife International, dan the Wildlife Conservation Society) dan sekretariat IUCN memulai serangkaian pembicaraan yang difasilitasi oleh IIED.
- 72 UNHCR mengenai NEPAL, temuan pengadilan Interamerika, sebagaimana dikutip pada LAMPIRAN secara rinci.
- 73 Schwartzman, S., A.Alencar, H.Zarin, dan A.P.Santos Souza, 2010, Social movements and large scale tropical forest protection on the Amazon frontier: Conservation from chaos, *Journal of Environment & Development* 19(3):274-279.
- 74 Forum bagi pemerintah Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1997, G7 menjadi G8, yang mencakup para pemerintah dalam G7 sebelumnya yang ditambah pemerintah Rusia.
- 75 Forum para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 19 negara, yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Republik Korea, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.
- 76 Dadush, Uri dan Bennett Stancil. 2009. "The G20 in 2050." *International Economic Bulletin*, Carnegie Endowment for International Peace. November 2009. <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=24195>
- 77 Statistik terkini yang tersedia menunjukkan bahwa investasi Cina yang terkait dengan bantuan di tiga kawasan dunia yang sedang berkembang bertambah dari US\$1,5 miliar pada tahun 2003 menjadi US\$25 miliar pada tahun 2007, dengan Afrika sebagai penerima manfaat terbesar. Walaupun tidak sepenuhnya dapat dibandingkan (oleh karena bantuan Cina dihitung), nilai untuk Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Perancis pada tahun yang sama sebesar masing-masing US\$21,7 miliar, US\$12,2 miliar, US\$9,9 miliar, dan US\$9,9 miliar. (Lum, Thomas dkk. 2009. *China's Foreign Aid Activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia*. Congressional Research Service 6. www.fas.org/spp/crs/row/R40361.pdf)
- 78 UNECE/FAO. 2010. *Private Forest Ownership in Europe*. Geneva Timber and Forest Study Paper 26. Jenewa: Perserikatan Bangsa-Bangsa.



1238 Wisconsin Avenue NW / Suite 300
Washington, DC 20007
www.rightsandresources.org